



KABUPATEN
SIGI

PERATURAN BUPATI SIGI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RKPD



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan/keadaan dalam tahun berjalan antara lain berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
5. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan Sistematika:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2025;
 - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - BAB VII : Penutup.
- (2) Rincian Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman:
 - a. perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk kebutuhan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk menjamin kesesuaian:
 - 1) perumusan prioritas dan sasaran;
 - 2) rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - 3) prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
 - b. pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk menjamin:
 - 1) sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah;
 - 2) rencana program dan kegiatan;
 - 3) prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025; dan
 - 4) sasaran, rencana program dan prioritas daerah telah dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025.
 - c. Evaluasi Triwulan II terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025.

- (5). Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI SIGI,

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

DAFTAR ISI

❖	DAFTAR ISI	i
❖	DAFTAR TABEL	ii
❖	DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Dasar Hukum.....	2
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	6
	1.4 Maksud dan Tujuan.....	7
	1.5 Sistematika Penyusunan	8
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	1
	2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2025	1
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	1
	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1
	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	1
	4.2 Prioritas Pembangunan Daerah	6
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	1
BAB VII	PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja dan Realisasi sampai Triwulan II Tahun 2025	1
Tabel 3.1	Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Sigi Tahun 2023 Perkiraan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	9
Tabel 3.2	Pendapatan sebelum dan sesudah Perubahan Kabupaten Sigi Tahun 2025.....	13
Tabel 3.3	Belanja Daerah sebelum dan sesudah Perubahan Kabupaten Sigi Tahun 2025.....	20
Tabel 3.4	Pembiayaan Daerah sebelum dan sesudah Perubahan Kabupaten Sigi Tahun 2025	24
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2025 yang terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.....	2
Tabel 4.2	Prioritas Nasional	8
Tabel 4.3	Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia" Tahun 2025.....	9
Tabel 4.4	Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Tahun 2025.....	10
Tabel 4.5	Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Tahun 2025.....	13
Tabel 4.6	Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Tahun 2025.....	15

Tabel 4.7	Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dalam RKP Tahun 2025.....	18
Tabel 4.8	Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dalam RKP Tahun 2025.....	20
Tabel 4.9	Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan dalam RKP Tahun 2025.....	21
Tabel 4.10	Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dalam RKP Tahun 2025.....	23
Tabel 4.11	Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional, Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2025.....	24
Tabel 4.12	Sinkronisasi Antara Misi, Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPDP.....	33
Tabel 5.1	Rekapitulasi Alokasi Anggaran Perubahan RKPDP Perangkat Daerah Tahun 2025.....	2
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sigi Tahun 2025	1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sigi Tahun 2025.....	3
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi Tahun 2025.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Perencanaan Pembangunan Daerah	9
Gambar 3.1	Sasaran Pembangunan Nasional.....	3
Gambar 4.2	Tema Prioritas Pembangunan Kabupaten Sigi, Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi	7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi. Dengan berakhirnya RPJMD Tahun 2021-2026 yang sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi pada tahun 2025 maka Dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sigi Tahun 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 juga merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih Periode 2025-2029. Adapun penyusunan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 345 dengan tahapan:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
3. Penetapan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2025 berisi kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun kegiatan yang diarahkan untuk mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sigi yang menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai. selanjutnya untuk mengetahui kondisi secara umum program dan kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun yang lalu yang memuat kemajuan yang sudah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi untuk masing-masing bidang pembangunan yang dilaksanakan. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran dan prioritas pembangunan yang hendak dicapai, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD yang memasuki periode tahunan kelima/tahun terakhir, dan memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan pada periode tahunan kelima, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah. Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sigi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

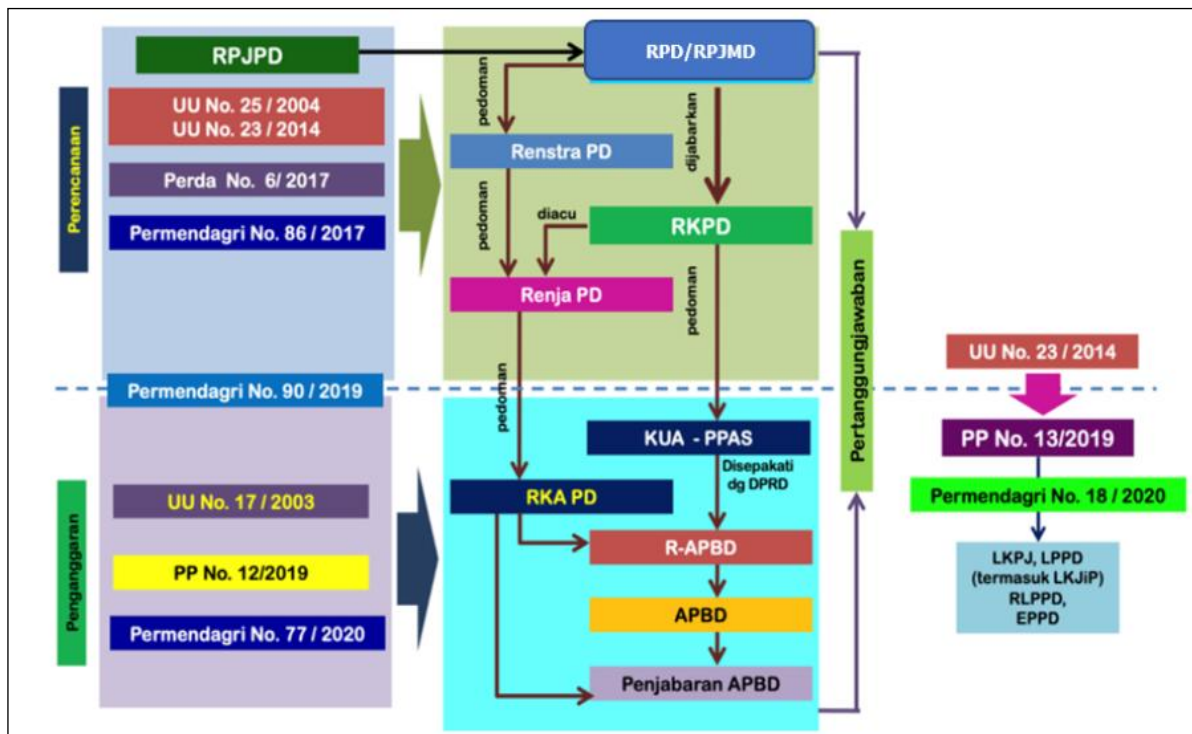
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2024 nomor);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 nomor 127);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);

1.3 Hubungan Antar Dokumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan pembangunan menghasilkan beberapa jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). disamping dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut diatas, dalam mewujudkan akselerasi pembangunan secara menyeluruh, Pemerintah Daerah juga memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa kesepakatan Nasional maupun Daerah.

Gambar 1.1
Bagan Alur Perencanaan Pembangunan Daerah



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap perubahan kebijakan, strategi, atau perkembangan situasi yang tidak sesuai dengan rencana awal dan menjadi landasan bagi seluruh OPD untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD).

Tujuan utama Perubahan RKPD adalah untuk memastikan RKPD tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, meskipun terjadi perubahan situasi atau kebijakan. Perubahan RKPD dapat mencakup perubahan kegiatan, anggaran, lokasi kegiatan, sasaran kegiatan, atau penambahan kegiatan baru.

Tujuan khusus dari penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sigi;
2. Terwujudnya prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

- Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- Mengintegrasikan rencana tata ruang daengan rencana pembangunan daerah;
- Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

RKPD Perubahan menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Sigi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

- 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Capaian Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sigi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
				7		13=12/7x100%		16
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	
		Semua Bidang						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	14.150.558.210	25,00%	35.376.396	Badan Pendapatan Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase iuran evaluasi yang menjadi masukan dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (%) (Nilai %)	100	6.860.376	25,00%	1.715.094	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	525.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1.017.800	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	840.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1.155.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	1.226.841	0,00%	0,00%	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	425.985	0,00%	0,00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1.669.750	0,00%	0,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%) (% %)	100	7.034.878.481	0,00%	21,16%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	6.826.259.081	0,00%	21,08%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	163.680.000	0,00%	16,67%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	22.617.400	0,00%	98,13%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	22.322.000	0,00%	0,00%	

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (%) persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi BMD yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (%)	100	47.803.653	0,00%	2,82%	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	596.524	0,00%	0,00%	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	22.847.129	0,00%	0,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	24.360.000	0,00%	5,54%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%) (%)	100	993.126.116	0,00%	1,31%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	128.805.800	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	79.024.609	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	188.152.766	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	4.000.000	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	67.301.000	0,00%	19,29%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	523.750.000	0,00%	0,00%	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.091.941	0,00%	0,00%	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase luaran pelaporan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerah Persentase luaran pelaporan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerah (%) (% %)	100	902.107.500	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	73.500	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	13.184.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	764.850.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	120.000.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	4.000.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%) persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%) %)	100	3.945.170.000	0,00%	33,26%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	7.730.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	3.515.040.000	0,00%	33,59%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	422.400.000	0,00%	31,18%	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%) (%) %)	100	1.220.612.084	0,00%	10,57%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	407.184.500	0,00%	25,64%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	109.406.000	0,00%	22,44%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	25	36.580.000	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	667.441.584	0,00%	0,00%	
						25,00%	25,00%	
						Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		KEUANGAN						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1.538.020.758		4,38%	Badan Pendapatan Daerah
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pajak Daerah Jumlah Pajak Daerah (Rupiah 2519039118 8 Rupiah)	0	1.538.020.758	0,00%	4,38%	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	7	28.815.000	0,00%	0,00%	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	3	46.366.000	0,00%	25,36%	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	4	595.350.000	0,00%	0,66%	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	10	39.000.000	0,00%	0,00%	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	7	130.242.157	0,00%	0,00%	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	7	23.820.635	0,00%	0,00%	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	37808	95.200.000	0,00%	0,00%	

		Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	3	69.548.320	0,00%	0,00%	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	240	123.207.409	0,00%	12,66%	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	4	21.600.000	0,00%	16,67%	
		Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	3	132.170.788	0,00%	0,00%	
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	3	16.160.200	0,00%	0,00%	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	7	75.000.249	0,00%	3,20%	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	18	116.280.000	0,00%	5,88%	
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	25.260.000	0,00%	92,28%	
						25,00%	4,38%	
						Sangat Rendah	Sangat Rendah	
					15.688.578.968	25,00%	19,19%	
						Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	4.894.380.594	25,00%	12,08%	Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (%)	100	231.474.074	25,00%	57.868.519	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	5.250.394	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.860.100	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	4.860.100	0,00%	0,00%	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.503.900	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2.526.600	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	18.973.600	0,00%	0,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	192.499.380	0,00%	0,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	3.102.038.930	50,00%	13,29%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	2.864.959.590	19,12%	13,04%	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	200.750.370	100,00%	19,34%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	3	36.328.970	0,00%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	152.828.790	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.271.440	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	13.114.350	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	5.510.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	123.933.000	100,00%	0,00%	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	720.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	720.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	449.500.000	0,00%	24,93%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	55.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	394.500.000	100,00%	28,40%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	238.538.800	0,00%	28,04%	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	230.328.800	20,00%	29,04%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	4	8.210.000	0,00%	0,00%	
					26,83%	12,08%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PERENCANAAN							
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			482.506.200		2,24%	Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase analisis perencanaan dan pendanaan sesuai kapasitas fiskal daerah (%)	100	367.062.500	0,00%	2,94%	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1	4.581.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	999.900	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	28.612.000	100,00%	0,00%	

	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	20.100.200	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	46.287.000	0,00%	0,00%	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	200	27.685.400	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	238.797.000	33,33%	4,52%	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti OPD (%)	1	10.455.000	0,00%	0,00%	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	4.400.000	0,00%	0,00%	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	33	3.900.000	0,00%	0,00%	

	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	2.155.000	0,00%	0,00%	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis program dan kegiatan pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerahkan dalam dalvas dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan pembangunan daerah (%)	100	104.988.700	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	6	42.402.800	0,00%	0,00%	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	*Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	30	1.377.900	0,00%	0,00%	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	6	61.208.000	0,00%	0,00%	
					22,43%	2,24%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			361.650.550		1,53%	Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah

	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dianalisis sesuai bidangnya (%)	100	143.627.270	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	12.990.570	0,00%	0,00%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5	8.075.200	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	6.450.000	0,00%	0,00%	

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5	8.280.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	43.496.600	0,00%	0,00%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	6.776.800	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	9	46.749.900	0,00%	0,00%	

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	10.808.200	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang dianalisis sesuai bidangnya (%)	100	111.314.560	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6	40.590.500	0,00%	0,00%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	6	6.734.700	0,00%	0,00%	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	9.800.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	6	10.720.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	10.720.000	0,00%	0,00%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	11.740.320	0,00%	0,00%	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4.050.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	4	16.959.040	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dianalisis sesuai bidangnya (%)	100	106.708.720	0,00%	5,20%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	5.055.600	0,00%	0,00%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	10.332.120	0,00%	0,00%	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	9.665.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	6	10.721.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	26.855.000	0,00%	0,00%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	100	6.960.000	50,00%	79,74%	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	8.100.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	29.020.000	0,00%	0,00%	
					0,96%	1,53%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			331.363.850		0,00%	Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			331.363.850		0,00%	
	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	*Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	1	45.191.000	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	3	250.000.000	0,00%	0,00%	

	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	*Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	1	36.172.850	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			6.069.901.194		23,47%	10,01%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	184.179.944.660	25,00%	20,91%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD (1)	1	125.076.787	25,00%	4,20%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	24.006.587	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.100.000	0,00%	0,00%	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	84.370.200	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	5.250.000	100,00%	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	5.250.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	2.100.000	0,00%	0,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	2.000.000	0,00%	0,00%	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi Keuangan Perangkat Daerahh (1)	1	179.892.714.915	0,00%	21,11%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1165	178.806.221.475	100,00%	21,07%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	817.002.000	25,00%	25,10%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	269.491.440	22,22%	32,35%	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase lancarnya hasil analisis Dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (1)	1	5.150.000	0,00%	0,00%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2.700.000	0,00%	0,00%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	2.450.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (1)	1	115.500.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50	115.500.000	0,00%	0,00%	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi umum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (1)	1	438.738.438	0,00%	15,59%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000	100,00%	100,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9.870.000	100,00%	94,02%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	52.000.438	0,00%	23,11%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	66.000.000	16,67%	7,58%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	17.000.000	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	39.900.000	0,00%	38,35%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	238.968.000	5,56%	4,93%	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan (1)	1	506.563.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	100.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25	232.400.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	124.163.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	50.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD (1)	1	2.130.053.120	0,00%	13,59%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	310.200.000	25,00%	15,66%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.819.853.120	25,00%	13,24%	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	966.148.400	0,00%	17,73%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	24	535.058.400	20,83%	22,34%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	16	9.760.000	100,00%	100,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terlaksana pada tahun berjalan (%)	3	211.330.000	33,33%	19,90%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	210.000.000	0,00%	0,00%	
					97,65%	20,91%	
					Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	KEUANGAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			232.254.552.924		1,22%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Laporan Rencana Anggaran Daerah (%)	1	2.145.403.780	0,00%	11,82%	

	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	81.882.800	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	82.062.800	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	48	50.150.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	48	32.650.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	1.280.655.640	0,00%	14,07%	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	504.844.640	0,00%	14,53%	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	1.325.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	1	1.325.000	0,00%	0,00%	

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	1	1.058.400	0,00%	0,00%	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	200	109.449.500	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (%)	1	1.498.738.800	0,00%	9,36%	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1	93.398.000	0,00%	8,97%	
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1	2.210.000	0,00%	0,00%	

	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1	97.600.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	1	372.600.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	3.400.000	0,00%	0,00%	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	1	161.000.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1	2.550.000	0,00%	0,00%	

	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	6	370.640.000	0,00%	29,31%	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	6	219.216.800	0,00%	0,00%	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	96	176.124.000	0,00%	13,18%	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Dokumen)	1	1.491.178.780	0,00%	20,16%	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	2	121.608.000	0,00%	19,80%	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	50	75.808.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18	291.691.000	0,00%	18,44%	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	51	412.003.740	0,00%	48,75%	

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	121.019.100	0,00%	0,00%	
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	9.171.680	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	92.960.000	0,00%	20,52%	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	34.504.000	0,00%	0,00%	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	6.271.680	0,00%	0,00%	

	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	169.801.580	0,00%	0,00%	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	140	118.220.000	0,00%	2,43%	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	*Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	1	34.504.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	3.616.000	0,00%	0,00%	

	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	1	227.119.231.564	0,00%	0,94%	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	176	217.491.738.800	0,00%	0,02%	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	4.650.000.000	0,00%	44,90%	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	176	4.977.492.764	0,00%	0,00%	
					0,00%	1,22%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.064.798.000		16,11%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1.064.798.000	0,00%	16,11%	
	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	45.635.000	0,00%	19,17%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	5.250.000	0,00%	0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	389.660.000	0,00%	18,36%	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	110.464.700	0,00%	0,00%	

	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	315.155.900	0,00%	0,00%	
	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	2	69.637.400	0,00%	40,85%	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	21.300.000	0,00%	0,00%	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	49	107.695.000	0,00%	58,31%	
					0,00%	16,11%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				417.499.295.584	43,08%	9,94%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	3	4	7		13=12/7x100%		16
			K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	5.230.953.058	25,00%	24,82%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD (1)	100	28.390.200	25,00%	7.097.550	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	28.390.200	25,00%	0,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	4.291.597.948	25,00%	24,53%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	4.118.280.868	24,00%	24,92%	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	157.280.000	25,00%	16,61%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	16.037.080	0,00%	0,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi BMD yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (1)	100	16.200.000	25,00%	25,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	16.200.000	100,00%	25,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	252.318.910	25,00%	32,85%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	7.458.900	25,00%	100,00%	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	69.612.660	25,00%	50,27%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	59.699.350	25,00%	12,98%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	3.600.000	25,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	111.948.000	50,00%	29,19%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase luaran pelaporan dokumen penyediaan jasa penunjang yang menjadi masukan dalam pengelolaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah (1)	100	341.900.000	25,00%	27,54%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	5.000.000	25,00%	100,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	84.000.000	25,00%	13,97%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	252.900.000	25,00%	30,62%	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	100	300.546.000	25,00%	21,47%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	274.276.000	20,00%	23,53%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	39	26.270.000	33,33%	0,00%	
					24,68%	24,82%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
KEPEGAWAIAN							
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			488.815.020		18,70%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (0.8)	85	135.302.930	24,71%	20,66%	

	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	1	75.700.720	100,00%	32,31%	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	150	21.513.730	26,00%	0,00%	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	12.760.000	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	25.328.480	100,00%	13,81%	
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penanganan Administrasi Mutasi, Promosi dan Kepangkatan (0.75)	75	268.117.140	24,00%	18,25%	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	600	28.062.790	25,00%	31,64%	
	Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	8	240.054.350	25,00%	16,68%	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (0.8)	80	85.394.950	25,00%	17,00%	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	25	85.394.950	24,00%	17,00%	
					39,72%	18,70%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			1.436.296.950		33,51%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang memiliki sertifikat Diklat Teknis (0.8)	80	1.436.296.950	25,00%	33,51%	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1	1.436.296.950	25,00%	33,51%	
					25,00%	33,51%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				7.156.065.028	25,77%	26,14%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.857.236.747	25,00%	21,56%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.357.236.747	25,00%	26,14%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	2.357.236.747	25,00%	26,14%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan (laporan)	1	500.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	500.000.000	0,00%	0,00%	
					20,63%	21,56%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN							
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.083.565.447		8,46%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Persentase)	100	1.083.565.447	25,00%	8,46%	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	2	1.083.565.447	50,00%	8,46%	
					50,00%	8,46%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				3.940.802.194	28,70%	17,96%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
			7		13=12/7x100%		16	17
			K	Rp	K	Rp		
	Semua Bidang							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.775.354.422	25,00%	29,38%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase analisis perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai tahapan perencanaan, kecukupan dana dan akuntabilitasnya (1)	1	89.930.000	25,00%	12,93%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	89.930.000	30,00%	12,93%		Tidak Ada
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	0	2.254.470.042	0,00%	31,72%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	2.182.260.042	100,00%	32,29%		Tidak Ada
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	72.210.000	25,00%	14,58%		Tidak Ada
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0	35.770.000	0,00%	0,00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	35.770.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase lancarnya Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0	249.836.980	0,00%	19,62%		

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	24.000.000	25,00%	16,73%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	225.836.980	50,00%	19,93%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase lancarnya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0	145.347.400	0,00%	27,23%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	145.347.400	0,00%	27,23%		Tidak Ada
					84,54%	29,38%		
					Tinggi	Sangat Rendah		

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.128.062.600		7,29%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila (jumlah)	5	1.128.062.600	0,00%	7,29%		
	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka (Orang)	44	1.128.062.600	100,00%	7,29%		Tidak Ada
					100,00%	7,29%		
					Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			553.391.400		0,55%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik (jumlah)	5	553.391.400	0,00%	0,55%		

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	10	553.391.400	0,00%	0,55%		Tidak Ada
					0,00% Sangat Rendah	0,55% Sangat Rendah		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			19.640.000		15,43%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terdata (Data)	4	19.640.000	0,00%	15,43%		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	6	19.640.000	0,00%	15,43%		Tidak Ada
					0,00% Sangat Rendah	15,43% Sangat Rendah		

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			100.000.000		0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (jumlah)	2	100.000.000	0,00%	0,00%		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	100.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
					0,00%	0,00%		
					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1.036.464.900		28,89%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah fasilitas FOKOPIMDA Tim penanganan terpadu konflik sosial, FKD dan FKDM (Rapat)	4	1.036.464.900	0,00%	28,89%		

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	28	822.426.900	100,00%	30,14%		Tidak Ada
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	214.038.000	25,00%	24,11%		Tidak Ada
					84,51%	28,89%		
					Tinggi	Sangat Rendah		
				5.612.913.322	77,50%	21,43%		
					Tinggi	Sangat Rendah		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	273.728.560.411	25,00%	20,09%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luasan pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	273.728.560.411	25,00%	20,09%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2100	273.728.560.411	25,00%	20,09%	
					25,00%	20,09%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN			64.057.927.479		0,15%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase angka partisipasi sekolah 7- 12 tahun Persentase angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun (% 90 %)	80	37.824.496.479	25,00%	0,25%	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	5	575.000.000	0,00%	0,00%	

	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	1.810.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	10	646.520.785	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	100	1.525.000.000	0,00%	0,00%	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	250	383.166.731	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	2500	25.385.901.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1.529.514.234	0,00%	6,20%	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	2.074.353.729	0,00%	0,00%	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	915.000.000	0,00%	0,00%	

	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	62.000.000	0,00%	0,00%	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	1.150.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	69	1.768.040.000	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase angka partisipasi sekolah 13 - 15 Tahun (%)	80	14.684.238.334	0,00%	0,00%	
	Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5	715.000.000	0,00%	0,00%	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	1.215.000.000	0,00%	0,00%	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	311.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	10	338.985.030	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	10	974.538.404	0,00%	0,00%	

	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	250	495.925.200	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS Tingkat SMP (orang)	2500	10.277.864.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	300.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	10	55.925.700	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase angka partisipasi sekolah 4 - 6 Tahun (%)	80	7.954.187.666	0,00%	0,00%	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1	371.700.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	20	522.166.466	0,00%	0,00%	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	50	207.435.700	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	100	4.293.236.000	0,00%	0,00%	

	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	226.522.000	0,00%	0,00%	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	2.333.127.500	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase jumlah kelulusan kejar Paket A dan B (%)	100	3.595.005.000	0,00%	0,00%	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	10	226.175.000	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	100	3.368.830.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,15%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			4.936.270.190		0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rata-rata Rasio Guru terhadap murid per sekolah (Guru/murid)	21	4.936.270.190	0,00%	0,00%	

	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	4.936.270.190	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1.831.997.480		8,19%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang di bina (%)	80	1.831.997.480	18,75%	8,19%	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	*Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	10	724.988.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	4	1.107.009.480	25,00%	13,55%	
					15,11%	8,19%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			907.184.000		0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar seni tradisional yang dibina (%)	80	907.184.000	0,00%	0,00%	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	10	907.184.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			429.326.320		0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah SK penetapan cagar Budaya (jumlah)	3	429.326.320	0,00%	0,00%	
	Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	20	429.326.320	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				345.891.265.880	19,86%	15,97%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASIKINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

TRIWULAN I

Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	51.495.807.800	25,00%	25,00%	Dinas Kesehatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	51.495.807.800	25,00%	25,00%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		51.495.807.800	25,00%	25,00%	
					25,00%	25,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			34.606.716.316		0,00%	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			10.676.485.429		0,00%	
	Pembangunan Puskesmas	*Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	2	3.555.741.429	0,00%	0,00%	

	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	10	197.443.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	6.762.320.680	0,00%	0,00%	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1	160.980.320	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang dilaksanakan (1)	1	23.930.230.887	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1000	107.960.000	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1000	118.400.000	0,00%	0,00%	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	100	250.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	15.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	48.051.000	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	129.170.394	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	322.070.000	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	254.171.043	0,00%	0,00%	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	627.339.084	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	18.608.056.300	0,00%	0,00%	

	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	44.275.000	0,00%	0,00%	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	697.225.192	0,00%	0,00%	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	566.429.045	0,00%	0,00%	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1.626.248.250	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	515.835.579	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			3.461.642.000		0,00%	Dinas Kesehatan
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			53.791.000		0,00%	

	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	53.791.000	0,00%	0,00%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			2.279.500.000		0,00%	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	779.500.000	0,00%	0,00%	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	100	1.500.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.128.351.000		0,00%	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	100	1.128.351.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			408.834.000		0,00%	Dinas Kesehatan
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			118.447.000		0,00%	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1	118.447.000	0,00%	0,00%	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			145.549.000		0,00%	

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	145.549.000	0,00%	0,00%	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			144.838.000		0,00%	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	100	144.838.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			242.450.000		0,00%	Dinas Kesehatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			242.450.000		0,00%	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	242.450.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				90.215.450.116	14,27%	14,27%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

TRIWULAN I

Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.606.629.676	25,00%	25,58%	Dinas Sosial
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase % luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (1)	31	2.606.629.676	100,00%	25,58%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	2.606.629.676	100,00%	25,58%	
					100,00%	25,58%	
					Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			30.440.900		0,00%	Dinas Sosial
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan (persentase)	25	30.440.900	0,00%	0,00%	
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	*Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	25	30.440.900	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			3.696.484.452		10,88%	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi (1)	520	2.842.900.032	25,00%	8,26%	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	120	414.676.200	16,67%	14,40%	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	*Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	2.048.615.832	10,00%	2,59%	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	379.608.000	25,00%	32,11%	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang di Rehabilitasi Sosial (1)	750	853.584.420	24,93%	19,62%	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	29.937.800	0,00%	0,00%	

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	*Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450	769.977.520	16,67%	21,75%	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	53.669.100	0,00%	0,00%	
					13,45%	10,88%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			6.333.555.028		49,01%	16,88%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	4.516.085.988	25,00%	26,28%	Dinas Perhubungan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dokumen 50 Orang/Bulan)	1	3.959.354.292	25,00%	25,74%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	3.868.694.292	100,00%	25,86%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	90.660.000	0,00%	20,75%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	1	10.200.000	0,00%	25,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	10.200.000	0,00%	25,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	30.935.696	0,00%	44,82%	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11.247.976	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.061.720	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1.050.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	3.600.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	13.976.000	0,00%	99,20%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	168.000.000	0,00%	14,76%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	24.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	144.000.000	0,00%	17,22%	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	347.596.000	0,00%	36,36%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	341.586.000	0,00%	37,00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	10	6.010.000	0,00%	0,00%	
					85,66%	26,28%	
					Tinggi	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			680.274.900		8,99%	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			200.000.000		10,53%	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1	200.000.000	0,00%	10,53%	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2	319.084.900	0,00%	12,57%	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	319.084.900	0,00%	12,57%	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	1	161.190.000	0,00%	0,00%	

	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	1	161.190.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	8,99%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			87.500.000		0,00%	Dinas Perhubungan
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1	87.500.000	0,00%	0,00%	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	*Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	1	87.500.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				5.283.860.888	73,22%	23,62%	
					Sedang	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	4.086.842.551	25,00%	20,52%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase LKIP PD yang diserahkan tepat waktu (%)	1	4.677.000	25,00%	25,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4.677.000	0,00%	25,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	14	2.123.892.866	25,00%	25,20%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	2.050.212.866	25,00%	25,21%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	73.680.000	25,00%	25,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase lancarnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	1	14.280.000	25,00%	17,86%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	14.280.000	50,00%	17,86%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	1	110.907.685	0,00%	0,00%	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	30.999.400	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3.196.285	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	32.852.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	43.860.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (%)	1	21.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	21.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	1.515.880.000	25,00%	18,51%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	3.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	1.308.380.000	25,00%	17,88%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	6.500.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	198.000.000	25,00%	23,54%	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	8	296.205.000	25,00%	6,75%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	296.205.000	12,50%	6,75%	
					23,29%	20,52%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			53.600.000		0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi melalui media elektronik dan media massa (Media)	8	53.600.000	0,00%	0,00%	
	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	8	53.600.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			191.185.000		0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan ke website pemerintah kab sigi (Pengunjung)	1000	191.185.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	*Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	191.185.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				4.331.627.551	21,97%	19,36%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.344.103.584	25,00%	25,19%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.344.103.584	25,00%	25,19%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	2.344.103.584	25,00%	25,19%	
					25,00%	25,19%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1.708.467.000		8,00%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi keahlian dibidangnya (orang)	20	1.357.164.500	0,00%	9,44%	

	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	20	842.373.500	0,00%	11,86%	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	1	514.791.000	0,00%	5,48%	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK Swasta yang profesional dibidangnya (Lembaga)	2	351.302.500	0,00%	2,41%	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2	351.302.500	0,00%	2,41%	
					0,00%	8,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			32.500.000		0,00%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang difasilitasi oleh Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) (0.32)	32	25.425.250	0,00%	0,00%	
	Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	40	25.425.250	0,00%	0,00%	

	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Migran yang di advokasi undefined (Orang undefined undefined)	25	7.074.750	0,00%	0,00%	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	*Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	5	7.074.750	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				4.085.070.584	14,35%	17,80%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	3.131.566.316	25,00%	21,86%	Dinas Pariwisata
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD (1)	100	7.798.000	25,00%	25,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1	7.798.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	1	2.278.388.886	25,00%	22,45%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	2.202.855.756	25,00%	22,67%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	75.533.130	25,00%	15,91%	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	1	120.399.430	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	49.933.430	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	13.959.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	56.507.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	1	499.500.000	25,00%	28,17%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	120.000.000	25,00%	25,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	379.500.000	25,00%	29,17%	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	1	225.480.000	25,00%	14,39%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	225.480.000	25,00%	14,39%	
					23,98%	21,86%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			335.384.500		23,26%	Dinas Pariwisata
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Yang Menjadi Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/kota (OW)	3	335.384.500	25,00%	23,26%	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	15	120.000.000	0,00%	0,00%	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	215.384.500	25,00%	36,21%	
					16,06%	23,26%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			70.751.000		0,00%	Dinas Pariwisata
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (MOU)	4	70.751.000	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	70.751.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			64.144.500		0,00%	Dinas Pariwisata
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah tahapan pelatihan peningkatan SDM Parekraf tingkat dasar (Kali)	2	41.180.000	0,00%	0,00%	
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	20	10.635.000	0,00%	0,00%	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	30.545.000	0,00%	0,00%	

	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Produktif (Kali)	20	22.964.500	0,00%	0,00%	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	40	22.964.500	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				3.601.846.316	22,34%	21,17%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.952.780.325	25,00%	22,98%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	1	2.519.648.175	25,00%	23,39%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	2.407.448.175	32,00%	23,55%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	112.200.000	0,00%	19,95%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang mejadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (1)	1	18.360.000	0,00%	13,89%	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	18.360.000	0,00%	13,89%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	1	104.456.550	0,00%	0,42%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.174.600	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	35.082.950	0,00%	1,26%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	44.199.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	1	206.600.000	0,00%	27,78%	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	28.500.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	176.100.000	0,00%	32,60%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	1	103.715.600	0,00%	27,88%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	98.340.600	0,00%	29,40%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	1	4.260.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1.115.000	0,00%	0,00%	
					26,09%	22,98%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			456.823.999		9,85%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar yang memadai (Unit)	1	453.343.999	0,00%	9,93%	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	453.343.999	0,00%	9,93%	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pasar yang layak fungsi (Pasar)	17	3.480.000	0,00%	0,00%	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	3.480.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	9,85%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			2.036.725.000		49,10%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang dipantau (Komoditi)	22	2.036.725.000	0,00%	49,10%	

	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2.036.725.000	0,00%	49,10%	
					0,00%	49,10%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			25.146.000		0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP yang di tera/tera ulang dan diawasi sesuai standar/regulasi (%)	1	25.146.000	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	300	23.446.000	0,00%	0,00%	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	50	1.700.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			144.603.750		0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi (sosialisasi) pembangunan industri (Dokumen)	1	144.603.750	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1.500.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	4.550.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	137.553.750	0,00%	0,00%	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	* Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1.000.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			150.000		0,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya Data base WUB/ IKM (0.98)	98	150.000	0,00%	0,00%	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	35	150.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				5.616.229.074	13,72%	30,69%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Pemuda Dan Olahraga

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.148.569.721	25,00%	25,00%	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.148.569.721	25,00%	25,00%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	2.148.569.721	100,00%	100,00%	
					100,00%	25,00%	
					Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			365.091.398		0,00%	Dinas Pemuda Dan Olahraga

	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Persentase organisasi pemuda aktif (Persen Persen Persen)	100	365.091.398	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	*Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1	101.200.998	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	1	263.890.400	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			2.914.936.222		0,00%	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Olahraga yang Terpelihara Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Persen Persen)	100	1.630.664.900	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2	1.630.664.900	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prestasi Olahraga Pelajar (Persen)	100	599.592.542	0,00%	0,00%	
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	15	599.592.542	0,00%	0,00%	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota (Persen Persen)	100	684.678.780	0,00%	0,00%	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	30	532.800.000	0,00%	0,00%	

	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	*Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	151.878.780	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			300.000.000		0,00%	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Sekolah yang didampingi kegiatan kepramukaan (Persen)	100	300.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1	300.000.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				5.728.597.341	37,51%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.921.480.362		5,21%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase luaran evaluasi kinerja dan oenyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah p y p r e s e n t a s e l kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah (% persen)	100	105.500.000	25,00%	0,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	6	84.400.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	21.100.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	14.619.246.569	25,00%	5,75%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	161	14.598.146.569	25,00%	5,76%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	21.100.000	0,00%	0,00%	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	2	21.100.000	25,00%	0,00%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	21.100.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	py p e r s e n t a s e l dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (persen)	100	635.523.793	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	150.699.400	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	39.589.393	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	445.235.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	py P e r s e n t a s e l dokumen penyediaan jasa penunjang yang menjadi masukan dalam pengelolaan jasa penunjang urusan perangkat daerah (persen)	100	1.013.160.000	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	78.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	935.160.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (1)	100	526.950.000	25,00%	7,88%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	86	401.950.000	0,00%	10,32%	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	125.000.000	0,00%	0,00%	
					21,57%	5,21%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			3.895.657.000		0,00%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Penggunaan Sarana Pertanian (%)	100	3.895.657.000	25,00%	0,00%	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	3.713.600.000	0,00%	0,00%	
	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	*Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	11	182.057.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			3.556.300.000		0,00%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian (persen)	100	3.556.300.000	0,00%	0,00%	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	111	3.556.300.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2.762.857.232		0,00%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Implementasi Programa Penyuluhan Pertanian (%)	100	2.762.857.232	25,00%	0,00%	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	16	1.625.257.232	0,00%	0,00%	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	*Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	197	1.137.600.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				27.136.294.594	13,45%	3,25%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.535.398.298	25,00%	25,73%	Dinas Lingkungan Hidup
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.535.398.298	25,00%	25,73%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	2.535.398.298	25,00%	25,73%	
					25,00%	25,73%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			93.891.442		0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Sigi Jumlah lokasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Sigi (lokasi 3 Lokasi)	1	93.891.442	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	*Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	7	80.873.000	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	*Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	13.018.442	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			11.358.684.318		3,97%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang dilatih Jumlah kelompok yang dilatih (15 Kelompok)	15	11.358.684.318	20,00%	3,97%	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	10	9.822.941.330	0,00%	2,11%	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	3	211.220.000	0,00%	0,00%	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	15	1.324.522.988	20,00%	18,34%	
					2,33%	3,97%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			75.293.750		0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang ditangani Jumlah sampah yang ditangani (m3 18750 m3)	18750	75.293.750	9,02%	0,00%	
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	18750	75.293.750	9,02%	0,00%	
					9,02%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				14.063.267.808	6,44%	7,84%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	3	4	7		13=12/7x100%		16
			K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.638.347.076	25,00%	25,75%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (14 Orang/Bulan)	17	1.638.347.076	25,00%	25,75%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	1.638.347.076	25,00%	25,75%	
					25,00%	25,75%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			27.049.500		0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Bekerja sama dalam Peningkatan Strategi PUG dalam Mencapai Kesetaraan Gender (31,91 Persen)	31,91	27.049.500	0,00%	0,00%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	40	27.049.500	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			170.520.000		0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (%)	50	101.500.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	101.500.000	0,00%	0,00%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan (83,33 Persen)	83,33	69.020.000	0,00%	0,00%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	100	69.020.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			275.554.000		0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (Persen)	1,65	25.554.000	0,00%	0,00%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	31	25.554.000	0,00%	0,00%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembentukan Lembaga Penyedia Layanan (%)	66,66	250.000.000	0,00%	0,00%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	250.000.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			629.941.500		8,89%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terbentuknya Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha (57,16 Persen)	57,16	629.941.500	25,00%	8,89%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)	5	629.941.500	25,00%	8,89%	
					25,00%	8,89%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			230.140.000		0,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penjangkauan dan Pendampingan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus (Persen)	75	230.140.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Layanan)	1	230.140.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				2.971.552.076	19,08%	16,08%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	3.954.247.946	25,00%	25,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase iuran evaluasi yang menjadi masukan dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (%) (Nilai %)	1	26.934.280	25,00%	25,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	9.476.280	25,00%	25,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.058.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	10.400.000	50,00%	50,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	1	3.476.851.719	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	3.394.891.719	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	81.960.000	0,00%	0,00%	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi BMD yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (% %)	100	14.400.000	0,00%	0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	3	14.400.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	1	43.821.947	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.441.180	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5.158.767	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	32.222.000	0,00%	0,00%	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran pelaporan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerah (%)	1	8.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	8.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	1	201.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	60.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	141.000.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%) (%)	100	183.240.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	183.240.000	0,00%	0,00%	
					0,19%	25,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			146.514.593		0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi penanaman Modal Jumlah Potensi penanaman Modal (Jumlah Jumlah)	2	146.514.593	0,00%	0,00%	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	146.514.593	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			395.688.800		0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi Penanaman Modal yang ditindak lanjuti (jumlah)	2	395.688.800	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	259.342.600	0,00%	0,00%	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	136.346.200	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			126.635.000		0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi perijinan usaha (Hari)	2	126.635.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	50	35.942.840	0,00%	0,00%	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	80	78.457.160	0,00%	0,00%	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	10	12.235.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			165.735.880		0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (Dokumen)	3	165.735.880	0,00%	0,00%	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	5	34.565.080	0,00%	0,00%	

	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	10	81.170.800	0,00%	0,00%	
	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	4	50.000.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			4.788.822.219		0,16%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.433.781.864	25,00%	25,72%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.433.781.864	25,70%	25,72%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	2.433.781.864	25,00%	25,72%	
					25,00%	25,72%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			834.861.123		16,12%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk (%)	100	834.861.123	20,30%	16,12%	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	3	221.541.123	0,00%	10,29%	

	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal (Kegiatan)	1	613.320.000	0,00%	18,22%	
					0,00%	16,12%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			5.732.451.000		1,62%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka pemakaian kontrasepsi modern Persentase Pelaksanaan Advokasi Komunikasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal (laporan 90 %)	95	5.120.451.000	2,11%	1,81%	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	*Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	1	446.851.000	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	16	4.631.600.000	0,00%	2,01%	
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	5	42.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (1)	100	18.000.000	0,00%	0,00%	

	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	23	18.000.000	0,00%	0,00%	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas (1)	100	594.000.000	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	16	594.000.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	1,62%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				9.001.093.987	6,76%	9,48%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	4.946.369.642	25,00%	20,97%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD (1)	1	73.574.000	25,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Dikoordinasikan Dan Disusun (Dokumen)	1	41.684.000	25,00%	0,00%	
		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		25,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Dikoordinasikan Dan Disusun (dokumen)	1	31.890.000	25,00%	0,00%	
		*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		100,00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	1	3.412.876.642	25,00%	24,89%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	3.258.376.642	23,08%	24,95%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	154.500.000	25,00%	23,63%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi BMD yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (1)	1	9.300.000	25,00%	24,19%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	9.300.000	25,00%	24,19%	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	1	558.698.250	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	943.560	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	28.775.040	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.861.000	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	417.334.650	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	3.600.000	25,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	106.184.000	25,00%	0,00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran pelaporan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerah (%)	1	16.450.000	25,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	16.450.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	1	675.000.000	25,00%	27,48%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	84.000.000	25,00%	13,29%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	591.000.000	25,00%	29,49%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	1	200.470.750	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	171.270.750	20,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	10	29.200.000	20,00%	0,00%	
					23,69%	20,97%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			33.948.000		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk Terdaftar (273389 Angka)	6	17.598.000	16,67%	0,00%	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	5	17.598.000	20,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2	16.350.000	25,00%	0,00%	
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	6	16.350.000	16,67%	0,00%	
					18,39%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			34.048.000		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta-Akta yang dikeluarkan (12000 Dokumen)	4	17.598.000	25,00%	0,00%	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	12	17.598.000	25,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Waktu Pelayanan sesuai SOP (Jam)	1	16.450.000	0,00%	0,00%	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	4	16.450.000	25,00%	0,00%	
					25,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			31.390.000		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pihak yang Memanfaatkan Data Kependudukan (Pihak)	4	31.390.000	25,00%	0,00%	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	25	15.040.000	24,00%	0,00%	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	5	16.350.000	20,00%	0,00%	
					21,92%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			3.558.000		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen Data Agregat Kependudukan (DAK) dan profil kependudukan yang tersedia (Dokumen)	2	3.558.000	25,00%	0,00%	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2	3.558.000	25,00%	0,00%	
					25,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				5.049.313.642	23,65%	20,54%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Inspektorat

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	3	4	7		13=12/7x100%		16
			K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	9.488.629.194	25,00%	17,48%	Inspektorat
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	16.654.000	25,00%	18,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	3.464.000	25,00%	24,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2.710.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2.096.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	2.096.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2.096.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2.096.000	0,00%	0,00%	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2.096.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.082.771.494		17,86%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56	6.983.531.494	0,00%	17,76%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	99.240.000	0,00%	25,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000		0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	15.000.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			180.000.000		12,88%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	180.000.000	0,00%	12,88%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.229.315.700		7,47%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.515.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	994.148.400	0,00%	1,61%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	31.652.300	0,00%	1,52%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	200.000.000	0,00%	37,70%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			429.600.000		20,46%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	168.000.000	0,00%	12,02%	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	261.600.000	0,00%	25,88%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			535.288.000		35,62%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	28	535.288.000	0,00%	35,62%	
					0,01%	17,48%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	INSPEKTORAT DAERAH						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1.903.124.400		5,92%	Inspektorat
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	jumlah laporan hasil pengawasan internal (Laporan)	20	1.631.792.400	0,00%	6,90%	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	12	362.274.000	0,00%	0,00%	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	12	228.324.000	0,00%	23,22%	
	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	30	344.124.000	0,00%	0,00%	
	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	2	48.324.000	0,00%	0,00%	
	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	16	224.124.000	0,00%	15,19%	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	45	424.622.400	0,00%	6,01%	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			271.332.000		0,00%	

	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	8	29.408.000	0,00%	0,00%	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	8	241.924.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	5,92%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			410.608.000		0,00%	Inspektorat
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			131.079.000		0,00%	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4	131.079.000	0,00%	0,00%	
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen pendampingan dan asistennsi Rekomendasi laporan obyek pendampingan (Dokumen 1 Laporan)	5	279.529.000	0,00%	0,00%	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	4	279.529.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				11.802.361.594	0,01%	15,01%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	4.248.762.906	25,00%	25,79%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	1	7.530.000	25,00%	25,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	7.530.000	25,00%	25,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	3.998.974.856	97,00%	26,70%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44	3.998.974.856	25,00%	26,70%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	1	40.644.950	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	16.232.950	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	24.412.000	0,00%	0,00%	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya (unit)	1	12.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	12.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	100	134.613.100	97,00%	20,76%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	24.000.000	25,00%	15,43%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	110.613.100	25,00%	21,92%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerah (1)	1	55.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45	21.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	34.000.000	0,00%	0,00%	
					24,37%	25,79%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			60.728.300		0,00%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan (Unit)	4	60.728.300	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	4	60.728.300	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			260.272.250		9,60%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase target pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan (1)	100	224.150.000	20,00%	11,15%	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	100	215.750.000	20,00%	11,58%	
	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	*Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	100	8.400.000	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi (Persentase (%))	88	36.122.250	0,00%	0,00%	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	4	36.122.250	0,00%	0,00%	
					16,58%	9,60%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			19.450.000		0,00%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Buku Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan (Buku)	1	19.450.000	0,00%	0,00%	

	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	19.450.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			22.382.250		0,00%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (1)	1	22.382.250	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	22.382.250	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			1.687.105.452		9,01%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan nelayan kecil (1)	100	1.687.105.452	20,00%	9,01%	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	100	1.687.105.452	20,00%	9,01%	
					20,00%	9,01%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			206.500.000		0,00%	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan (1)	1	206.500.000	0,00%	0,00%	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	20	206.500.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				6.505.201.158	21,76%	19,56%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.944.172.135	25,00%	24,68%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	1.944.172.135	25,00%	24,68%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	1.944.172.135	25,00%	24,68%	
					25,00%	24,68%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			768.068.500		9,82%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Yang Terkelola Sesuai Dengan Standar Teknis (Jumlah)	37	466.641.300	18,92%	16,16%	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	*Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	5	8.000.000	0,00%	0,00%	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	3	301.449.000	33,33%	25,02%	

	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	25000	112.192.300	0,00%	0,00%	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	*Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	2	45.000.000	0,00%	0,00%	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca, Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Kali)	15	301.427.200	0,00%	0,00%	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	21	86.931.000	0,00%	0,00%	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	18	84.675.000	0,00%	0,00%	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	17	129.821.200	0,00%	0,00%	
					13,08%	9,82%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			5.000.000		0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah yang dilestariakan (Jumlah)	10	5.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	*Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	9	5.000.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			51.662.250		0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Arsip Dinamis yang dikelola Kabupaten (%)	55	51.662.250	0,00%	0,00%	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	440	29.162.250	0,00%	0,00%	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	50	22.500.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			2.400.000		0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Presentase Arsip dibawah 10 Tahun yang telah dimusnahkan (%)	5	2.400.000	0,00%	0,00%	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	50	2.400.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				2.771.302.885	21,16%	20,04%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.832.426.145	25,00%	17,55%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1)	1	68.830.966	25,00%	25,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	4.761.333	25,00%	25,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.065.600	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.565.600	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	9.644.033	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	6.370.800	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4.634.000	0,00%	0,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	33.789.600	0,00%	0,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase luaran pelaporan keuangan Perangkat Daerah (1)	1	2.227.214.849	0,00%	22,31%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	2.004.734.849	0,00%	24,79%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	213.600.000	0,00%	0,00%	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	8.880.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase luaran pelaporan dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1)	1	10.200.000	0,00%	0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	10.200.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase luaran pelaporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1)	1	6.463.200	0,00%	0,00%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	6.463.200	0,00%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	1	39.883.770	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.754.770	0,00%	0,00%	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1.700.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	29.429.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah (1)	1	50.191.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	50.191.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (1)	1	347.762.360	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	11.324.180	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	48.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	288.438.180	0,00%	0,00%	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah (1)	1	81.880.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	69.700.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	26	12.180.000	0,00%	0,00%	
					0,04%	17,55%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			2.399.000.000		0,16%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%)	75	2.399.000.000	0,00%	0,16%	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	32	2.399.000.000	0,00%	0,16%	
					0,00%	0,16%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			1.283.750.000		3,11%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (%)	20,98	1.283.750.000	0,00%	3,11%	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	38	1.283.750.000	0,00%	3,11%	
					0,00%	3,11%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.872.739.700		5,55%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan (0.75)	75	1.872.739.700	0,00%	5,55%	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	3	200.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	6	1.672.739.700	0,00%	6,21%	
					0,00%	5,55%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				8.387.915.845	0,01%	7,69%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	8.831.913.974	25,00%	24,69%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	1	26.580.000	25,00%	25,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	26.580.000	25,00%	25,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	1	7.126.920.974	0,00%	25,93%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	79	7.126.920.974	1,27%	25,93%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	1	202.988.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	108.408.640	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	44.579.360	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	50.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen penyediaan jasa penunjang yang menjadi masukan dalam pengelolaan jasa penunjang urusan perangkat daerah (1)	1	1.054.525.000	0,00%	26,02%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	53.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.001.525.000	25,00%	27,40%	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (1)	1	420.900.000	0,00%	13,84%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	420.900.000	0,33%	13,84%	
					3,95%	24,69%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			4.000.000.000		0,00%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Peningkatan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Berkualitas (1)	1	4.000.000.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	415	4.000.000.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			87.500.000		17,71%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)	1	87.500.000	0,00%	17,71%	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	*Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3	87.500.000	0,00%	17,71%	
					0,00%	17,71%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			316.194.000		27,51%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Implementasi Programa Penyuluhan Pertanian (%)	1	316.194.000	0,00%	27,51%	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Kali)	16	316.194.000	3,13%	27,51%	
					3,13%	27,51%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				13.235.607.974	2,71%	17,25%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.437.068.921	25,00%	1,84%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah Presentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN (% %)	100	2.381.868.121	25,00%	25,00%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	2.381.868.121	25,00%	25,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1)	1	29.912.800	0,00%	66,19%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	29.912.800	0,00%	66,19%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1)	1	25.288.000	0,00%	98,86%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	25.288.000	0,00%	98,86%	
					24,43%	1,84%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			3.286.605.800		6,77%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (1)	1	3.286.605.800	0,00%	6,77%	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	176	3.286.605.800	0,00%	6,77%	
					0,00%	6,77%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				5.723.674.721	10,40%	4,67%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	6.966.198.270	25,00%	29,11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	30.970.760	25,00%	25,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	9.623.000	25,00%	25,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	6.000.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	6.000.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	6.000.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	3.347.760	0,00%	0,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	4.701.226.510	0,00%	32,37%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	4.234.006.510	25,00%	33,82%	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	467.220.000	25,00%	19,21%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (%)	100	16.200.000	0,00%	16,67%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	16.200.000	25,00%	16,67%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	298.940.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	163.600.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	51.337.800	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	240	3.600.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	80.402.200	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.687.500.000		23,59%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	177.900.000	25,00%	12,84%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.509.600.000	25,00%	24,85%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			231.361.000		45,40%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45	221.277.000	22,22%	47,46%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	14	10.084.000	0,00%	0,00%	
					23,73%	29,11%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				2.910.688.468		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Air (%)	20	1.900.000.000	0,00%	0,00%		
Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	6	200.000.000	0,00%	0,00%		
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	7	1.700.000.000	0,00%	0,00%		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (Meter)	1928	1.010.688.468	0,00%	0,00%		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	2700	1.010.688.468	0,00%	0,00%		
				0,00%	0,00%		
				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				11.404.657.000		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Kualitas Air Minum Sesuai Standar Kesehatan (%)	0,2	11.404.657.000	0,00%	0,00%		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	8	1.351.155.438	0,00%	0,00%		
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	335	4.169.808.562	0,00%	0,00%		
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1383	2.244.077.000	0,00%	0,00%		
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	750.000.000	0,00%	0,00%		

	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	974	2.889.616.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			65.039.900		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem pengelolaan air limbah dan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku (%)	20	65.039.900	0,00%	0,00%	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	65.039.900	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			1.298.200.000		1,93%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung (%)	20	1.298.200.000	0,00%	1,93%	
	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan (Bangunan Gedung Cagar Budaya)	1	1.000.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	100	298.200.000	0,00%	8,38%	
					0,00%	1,93%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			1.832.325.000		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			1.832.325.000		0,00%	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	3	1.000.000.000	0,00%	0,00%	
	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan (Dokumen)	4	832.325.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			8.712.640.532		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota (0.0157)	2,9	8.712.640.532	0,00%	0,00%	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	2	1.450.154.000	0,00%	0,00%	
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	*Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (KM)	10	100.000.000	0,00%	0,00%	
	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	10	2.123.175.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	4	500.000.000	0,00%	0,00%	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	116822	700.000.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	10	3.839.311.532	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			354.841.300		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Yang diselenggarakan, (%)	0	354.841.300	0,00%	0,00%	
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	150	354.841.300	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			484.900.000		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota Yang Diperdakan pada tahun berjalan, (%)	0	293.400.000	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	110.069.800	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	183.330.200	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, (%)	0	191.500.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	2	191.500.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				34.029.490.470	4,86%	6,03%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.533.150.939	25,00%	28,83%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.533.150.939	25,00%	28,83%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	2.533.150.939	21,97%	28,83%	
					21,97%	28,83%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			2.800.383.073		17,66%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (%)	100	2.800.383.073	25,00%	17,66%	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	24	2.800.383.073	25,00%	17,66%	

					25,00%	17,66%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			5.333.534.012		23,56%	22,97%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.447.739.484	25,00%	28,95%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase luaran evaluasi kinerja dan penyusunan program dan kegiatan yang menjadi masukan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD (1)	1	7.716.618	25,00%	25,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	4.717.407	25,00%	25,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	449.811	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	449.750	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	599.900	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	899.850	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	299.950	0,00%	0,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	299.950	0,00%	0,00%	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	1	1.724.615.477	0,00%	33,15%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	1.650.275.477	100,00%	33,15%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	74.340.000	25,00%	33,33%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi BMD yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (1)	1	6.750.000	0,00%	33,33%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	6.750.000	25,00%	33,33%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	1	69.898.389	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	14.740.600	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	743.689	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	11.096.100	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	43.318.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran pelaporan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pengadaan BMD perangkat daerah (%)	1	2.100.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	2.100.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	1	519.200.000	0,00%	25,94%	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	6.500.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	24.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	488.700.000	25,00%	27,56%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	1	117.459.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	115.019.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	10	2.440.000	0,00%	0,00%	
					73,29%	28,95%	
					Sedang	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			12.350.000		0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi KSP/USP Aktif (%)	37,5	12.350.000	0,00%	0,00%	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	20	12.350.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			12.350.000		0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi KSP/USP Yang Melaksanakan RAT tepat waktu (%)	38,29	12.350.000	0,00%	0,00%	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	*Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	20	12.350.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			895.000.000		0,67%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi (%)	62,35	895.000.000	0,00%	0,67%	
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	7	895.000.000	0,00%	0,67%	
					0,00%	0,67%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			3.161.172.200		0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha Mikro Yang Mendapat Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan usaha (%)	17,51	3.161.172.200	0,00%	0,00%	
	Pemulihan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	1425	2.896.172.200	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	8	180.000.000	0,00%	0,00%	

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	25	85.000.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			690.340.000		0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Sarana dan Prasarannya (%)	0,44	690.340.000	0,00%	0,00%	
	Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	15	370.000.000	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	*Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	20	320.340.000	0,00%	0,00%	
					0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				7.218.951.684	24,85%	9,90%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	3	4	7		13=12/7x100%		16
			K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	816.123.900	25,00%	204.030.975	Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan sesuai prioritasnya (1)	1	816.123.900	25,00%	204.030.975	
	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	27	175.347.238	25,00%	43.836.810	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	2	545.916.000	25,00%	136.479.000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	6	94.860.662	25,00%	23.715.166	
					25,00%	204.030.975	
					Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
			816.123.900		25,00%	25,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Hukum

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	3	4	7		13=12/7x100%		16
			K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DAERAH							
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100	748.465.780	25,00%	8,72%	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang diselesaikan (1)	1	748.465.780	25,00%	8,72%	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	653	486.624.800	21,75%	7,11%	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	2	181.272.000	25,00%	0,66%	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	3	80.568.980	25,00%	36,55%	
					22,88%	8,72%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			748.465.780		22,88%	8,72%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DAERAH							
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100	165.081.173	25,00%	412.703	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan (1)	100	165.081.173	25,00%	412.703	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	38.160.000	25,00%	95.400	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	1	40.380.000	25,00%	100.950	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	86.541.173	25,00%	216.353	
					25,00%	25,00	
					Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
			165.081.173		25,00%	25,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	3	4	7		13=12/7x100%		16
			K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DAERAH							
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100	204.085.500	25,00%	5,37%	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara elektronik 2. Persentase SDM Pengelola Barang Jasa yang tersertifikasi 3. Persentase penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa (1)	1	204.085.500	25,00%	5,37%	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	108.603.400	25,00%	2,69%	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1	57.993.100	25,00%	2,06%	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	11	37.489.000	25,00%	18,27%	
					25,00%	5,37%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			204.085.500		25,00%	5,37%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
			7		13=12/7x100%		16	17
1	3	4	K	Rp	K	Rp		
	Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	19.134.846.144	25,00%	27,25%	Sekretariat DPRD	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	29.000.000	25,00%	25,00%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	40	29.000.000	25,00%	25,00%		Tidak Ada
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (1)	1	3.109.489.718	0,00%	20,10%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	2.876.413.718	100,00%	18,07%		Tidak Ada
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	9	233.076.000	100,00%	45,12%		Tidak Ada
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (1)	1	1.649.227.376	0,00%	20,00%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	75.886.340	100,00%	78,16%		Tidak Ada
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	626.351.130	20,00%	0,91%		Tidak Ada

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	104.565.306	100,00%	46,86%		Tidak Ada
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	190.401.000	100,00%	11,82%		Tidak Ada
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	652.023.600	100,00%	29,65%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (1)	1	2.147.564.800	0,00%	26,56%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	43.224.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	396.000.000	25,00%	19,35%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.708.340.800	25,00%	28,91%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi masukan dalam pemeliharaan BMD perangkat daerah (%)	1	254.103.400	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	225.863.400	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	72	28.240.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			11.252.810.850		30,79%		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	30	11.162.810.850	100,00%	31,04%		Tidak Ada
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	30	90.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada

	Layanan Administrasi DPRD			692.650.000		32,21%		
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	12	234.750.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	3	457.900.000	100,00%	48,72%		Tidak Ada
					85,77%	27,25%		
					Tinggi	Sangat Rendah		
SEKRETARIAT DPRD								
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			3.671.883.845		27,88%	Sekretariat DPRD	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan daerah dan peraturan DPRD yang dibahas tepat waktu (1)	1	117.400.000	0,00%	0,00%		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	2	17.400.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2	100.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD yang berlaku (1)	1	121.800.000	0,00%	0,00%		
	Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	40	40.600.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	40	40.600.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	40.600.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peraturan daerah dan peraturan DPRD yang dibahas tepat waktu (1)	1	336.000.000	0,00%	25,00%		
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	6	192.000.000	100,00%	18,75%		Tidak Ada
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia (orang)	6	144.000.000	100,00%	33,33%		Tidak Ada

	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir (1)	1	990.754.454	0,00%	4,15%		
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	12	323.166.509	25,00%	12,73%		Tidak Ada
	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	30	667.587.945	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja sama daerah yang di sepakati (1)	1	290.000.000	0,00%	0,00%		
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	*Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	12	290.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Fasilitasi Tugas DPRD	persentase Tugas DPRD yang terselesaikan tepat waktu (1)	1	1.815.929.391	0,00%	49,47%		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	30	1.728.929.391	100,00%	51,96%		Tidak Ada
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1	29.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	5	58.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
					58,44%	27,88%		
					Rendah	Sangat Rendah		
				22.806.729.989	81,37%	27,35%		
					Tinggi	Sangat Rendah		

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DAERAH							
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100	18.425.070.557	25,00%	4.606.267.639	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah koordinasi Keagamaan Lingkup Koordinasi Bagian Kesra Jumlah Koordinasi Kesejahteraan Sosial Lingkup Koordinasi Bagian Kesra Jumlah Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat Lingkup Koordinasi Bagian Kesra (50 Koordinasi)	50	18.425.070.557	25,00%	4.606.267.639	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	23	18.413.332.657	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	2	5.369.500	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	2	6.368.400	0,00%	0,00%	
					0,00%	460626763925,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
			18.425.070.557		0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Organisasi

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	285.253.940	25,00%	12,47%	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Organisasi
	Penataan Organisasi	1. Persentase Perangkat Daerah yg dianalisis ANJAB dan ABK 2. Persentase ketatalaksanaan pelayanan publik 3. Persentase LKIP dan RB Kabupaten diselesaikan tepat waktu (1)	1	285.253.940	25,00%	12,47%	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	8	77.287.800	0,00%	14,15%	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	50.741.500	0,00%	28,79%	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	107.305.800	0,00%	0,00%	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	49.918.840	0,00%	20,06%	
					0,00%	12,47%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			285.253.940		0,00%	12,47%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DAERAH							
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100	4.732.842.508	25,00%	3,40%	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase tapal batas yang ditetapkan Evaluasi kinerja kecamatan (% 1 Peringkat)	100	4.702.842.508	25,00%	3,42%	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	5	4.468.709.408	20,00%	0,23%	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	50.371.800	0,00%	25,31%	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4	183.761.300	75,00%	74,92%	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang dilaporkan tepat waktu (1)	1	30.000.000	0,00%	0,00%	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	30.000.000	0,00%	0,00%	
					21,80%	3,40%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			4.732.842.508		21,80%	3,40%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	12.130.628.264	25,00%	25,27%	Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase LKIP PD yang diserahkan tepat waktu Persentase penyusunan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu (%)	100	233.629.600	25,00%	19,76%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	178.988.400	50,00%	9,25%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	5.316.000	100,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	568.700	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	6.349.100	100,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	3.016.200	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	8.754.400	100,00%	11,42%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	30.636.800	25,00%	93,43%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	11.872.105.344	25,00%	25,40%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	110	11.275.312.964	100,00%	25,43%	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	589.853.000	25,00%	25,18%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	3.417.580	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	896.800	100,00%	0,00%	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1.750.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	875.000	22,22%	0,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (1)	100	24.893.320	25,00%	16,27%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	4.005.720	0,00%	0,00%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4.687.600	0,00%	0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6	16.200.000	0,00%	25,00%	
					95,14%	25,27%	
					Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
				12.130.628.264	95,14%	25,27%	
					Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perlengkapan dan Umum

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	13.851.108.874	25,00%	34.627.772	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perlengkapan dan Umum
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (1)	1	141.050.000	25,00%	25,00%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	141.050.000	25,00%	25,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi umum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (1)	1	3.722.173.086	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	22.376.700	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	64.616.400	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	1.069.522.854	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	21.012.132	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	9	1.653.753.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	350	890.892.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan (1)	1	1.372.150.850	0,00%	0,00%	

	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	600	649.470.850	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	40	722.680.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase lancarnya Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD persentase luaran hasil analisis Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (% % %)	100	2.790.370.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	20.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	523.200.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	60.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2.187.170.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	2.604.337.044	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	1.594.143.004	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	483.946.450	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	50	46.990.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	479.257.590	0,00%	0,00%	

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase lancarnya pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1)	1	1.875.847.894	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	582.292.894	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	293.555.000	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	1.000.000.000	0,00%	0,00%	
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase rumah tangga Sekretariat Daerah yang difasilitasi (1)	1	1.345.180.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan (Paket) (paket)	2	720.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	555.110.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	70.070.000	0,00%	0,00%	
					0,25%	25,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				13.851.108.874	0,25%	25,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DAERAH							
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100	63.938.436	25,00%	15.984.609	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Administrasi Perekonomian yang dikoordinasikan dengan PD Terkait (1)	1	35.688.436	25,00%	8.922.109	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	6.850.000	0,00%	0,00%	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1	22.272.328	0,00%	0,00%	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	6.566.108	0,00%	0,00%	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Hasil Pemantauan SDA yang dikoordinasikan dengan PD Terkait (1)	1	28.250.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	9.700.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	8.350.000	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1	10.200.000	0,00%	0,00%	

					0,00%	1598460900,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
				63.938.436	0,00%	0,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		12		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			41.367.966.615		4.873.479.119		11,78%	RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	119.966.615	25	-	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	119.966.615	3	-	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah (%)	100	1.248.000.000	25	235.078.212	25,00%	18,84%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1.248.000.000	3	235.078.212	25,00%	18,84%	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kepuasan Pasien (%)	80	40.000.000.000	20	4.638.400.907	25,00%	11,60%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	9	40.000.000.000	2	4.638.400.907	25,00%	11,60%	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25,00%	11,78%	
					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			13.000.000.000		-	0,00%	RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase menurunnya Pasien yang dirujuk (%)	10	9.800.000.000	3	-	25,00%	0,00%	
	Pengembangan Rumah Sakit	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	3.800.000.000	0	-	25,00%	0,00%	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4	6.000.000.000	1	-	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Komplain Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit (0.25)	20	3.200.000.000	5	-	25,00%	0,00%	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	12	3.200.000.000	3	-	25,00%	0,00%	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25,00%	0,00%	
					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			117.013.000		-	0,00%	RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga SDM Rumah Sakit yang dilatih (0.6)	60	117.013.000	15	-	25,00%	0,00%	

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	8	117.013.000	-	-	0,00%	0,00%	
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25,00%	25,00%	
					Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			54.484.979.615		N KINERJA DAN ANGGARAN		25,00%	8,94%	
					T KINERJA DARI SELURUH		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dolo Barat

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.214.891.756	25,00%	23,83%	Dolo Barat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Iuran Pelaporan Keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	1.957.752.176	100,00%	25,00%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	1.910.592.176	100,00%	25,00%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	0	47.160.000	0,00%	25,00%	
		*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		0,00%		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi perangkat daerah (%)	100	9.000.000	25,00%	25,00%	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD (Dokumen)	1	9.000.000	0,00%	25,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	43.565.730	25,00%	14,09%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.383.240	100,00%	83,16%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4.276.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2.356.490	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	27.550.000	0,00%	0,00%	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase iuran hasil nalisis Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persentase luaran hasil analisis Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (% %)	100	23.532.500	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	23.532.500	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1)	1	111.290.000	100,00%	19,95%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.500.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	12.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	97.790.000	0,00%	22,70%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1)	1	69.751.350	0,00%	11,04%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	69.021.350	0,00%	11,16%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	1	730.000	0,00%	0,00%	
					86,59%	23,83%	
					Tinggi	Sangat Rendah	
				2.214.891.756	86,59%	23,83%	
					Tinggi	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dolo Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.599.377.682	25,00%	24,94%	Dolo Selatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	1.371.425.148	25,00%	26,48%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	1.330.145.148	100,00%	26,52%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	41.280.000	25,00%	25,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	1	9.000.000	0,00%	25,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	9.000.000	25,00%	25,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	1	50.162.534	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.850.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.634.034	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	731.500	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8	21.947.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	10.000.000	0,00%	0,00%	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	1	11.900.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	11.900.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	98.510.000	0,00%	27,10%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.010.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	12.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	85.500.000	25,00%	31,23%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	58.380.000	0,00%	11,65%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	32.770.000	25,00%	20,75%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	3	610.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	25.000.000	0,00%	0,00%	
					85,80%	24,94%	
					Tinggi	Sangat Rendah	
				1.599.377.682	85,80%	24,94%	
					Tinggi	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

TRIWULAN I

Dolo

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung jawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.235.297.865	25,00%	558824466,25%	Dolo
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	100	2.041.451.565	25,00%	95,76%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	1.954.930.965	25,00%	100,00%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15	86.520.600	0,00%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	66.756.300	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4.006.300	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13	62.750.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) (1)	100	59.620.000	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.020.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	24.000.000	25,00%	0,00%	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	33.600.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) (1)	100	67.470.000	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	26.400.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	34.500.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	6	6.570.000	0,00%	0,00%	
					22,13%	558824466,25%	
					Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
				2.235.297.865	22,13%	87,46%	
					Sangat Rendah	Tinggi	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

TRIWULAN I

Gumbasa

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.513.341.294	25,00%	22,72%	Gumbasa
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukkan dalam pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah [deleted] Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukkan dalam pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah (% %)	100	1.288.024.514	25,00%	24,72%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	1.244.224.514	25,00%	24,77%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	43.800.000	0,00%	23,08%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah (%)	100	15.230.000	25,00%	24,62%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	15.230.000	0,00%	24,62%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	64.282.500	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9.437.200	100,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	132.300	100,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	24	54.713.000	20,83%	0,00%	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	88.604.280	25,00%	24,48%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	6.000.000	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	82.604.280	25,00%	26,26%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	57.200.000	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	57.200.000	25,00%	0,00%	
					24,35%	22,72%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				1.513.341.294	24,35%	22,72%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Kinovaro

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.248.793.206	25,00%	25,00%	Kinovaro
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan Perangkat daerah (%)	1	2.014.401.506	25,00%	25,00%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26	1.966.790.706	100,00%	100,00%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	47.610.800	0,00%	0,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah (%) (1)	1	8.767.600	0,00%	0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	8.767.600	0,00%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) (1)	1	29.869.100	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.122.400	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	941.700	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	16.605.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	7.200.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (%)	1	23.700.000	0,00%	0,00%	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	23.700.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) (1)	1	134.455.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.730.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	12.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	120.725.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) (1)	1	37.600.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	22.600.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	15.000.000	0,00%	0,00%	
					87,46%	25,00%	
					Tinggi	Sangat Rendah	
				2.248.793.206	87,46%	25,00%	
					Tinggi	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Kulawi

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.860.074.031	25,00%	21,15%	Kulawi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.602.560.331	25,00%	23,90%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	1.548.200.331	100,00%	23,86%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	54.360.000	0,00%	25,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.628.700		4,79%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.904.600	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4.825.100	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	76.274.000	0,00%	8,26%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	46.625.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			106.925.000		0,22%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	500.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1.500.000	0,00%	15,55%	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	104.925.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.960.000		20,52%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	18.960.000	0,00%	20,52%	
					83,23%	21,15%	
					Tinggi	Sangat Rendah	
				1.860.074.031	83,23%	21,15%	
					Tinggi	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Kulawi Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.804.416.839	25,00%	74,17%	Kulawi Selatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (14 Orang/Bulan)	14	1.383.146.539	100,00%	96,76%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13	1.338.266.539	25,00%	100,00%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	44.880.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (1)	1	8.160.000	0,00%	0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	8.160.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (1)	1	245.250.300	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	37.246.900	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2.552.400	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	205.451.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (1)	1	98.360.000	0,00%	0,00%	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	510.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	6.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	91.850.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Serapan Administrasi Perangkat Daerah (1)	1	69.500.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	27.500.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	42.000.000	0,00%	0,00%	
					18,54%	74,17%	
					Sangat Rendah	Sedang	
				1.804.416.839	18,54%	74,17%	
					Sangat Rendah	Sedang	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Lindu

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.256.550.721	25,00%	0	Lindu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah (1)	1	969.150.071	25,00%	25,00%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10	920.366.071	25,00%	25,00%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	48.784.000	0,00%	0,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah pada perangkat daerah (1)	1	7.793.600	0,00%	0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	7.793.600	0,00%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah (1)	1	104.902.050	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	36.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	11.052.050	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	57.850.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milih daerah penunjang pemerintahan daerah (1)	1	3.500.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3.500.000	0,00%	0,00%	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1)	1	88.100.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	3.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	6.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	79.100.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	83.105.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	83.105.000	0,00%	0,00%	
					18,31%	25,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				1.256.550.721	18,31%	25,00%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Nokilalaki

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	3	4	7		13=12/7x100%		16
			K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.679.807.032	25,00%	25,00%	Nokilalaki
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN Presentase iuran pelaporan keuangan yang jadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan 100 Laporan)	1	1.404.817.890	25,00%	25,00%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	1.404.817.890	100,00%	100,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase iuran hasil analisis dokumen administrasi umum perangkat daerah (stel)	100	87.032.150	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	87.032.150	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase iuran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Bulan)	100	103.680.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	103.680.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase iuran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Unit)	100	84.276.992	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	84.276.992	0,00%	0,00%	
					83,63%	25,00%	
					Tinggi	Sangat Rendah	
			1.679.807.032		83,63%	25,00%	
					Tinggi	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Palolo

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.226.456.881	25,00%	556.614.220	Palolo
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Iuran Pelaporan Keuangan Yang Menjadi Masukan Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1)	1	1.829.009.289	25,00%	457.252.322	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	1.754.853.889	100,00%	1.754.853.889	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	74.155.400	0,00%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase iuran hasil analisis dokumen administrasi umum perangkat daerah (stel)	1	94.415.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	94.415.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Iuran Hasil Analisis Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	111.880.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	111.880.000	0,00%	0,00%	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Iuran Hasil Analisis Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)	1	191.152.592	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	126.298.192	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	64.854.400	0,00%	0,00%	
					78,82%	25,00%	
					Tinggi	Sangat Rendah	
				2.226.456.881	78,82%	25,00%	
					Tinggi	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Pipikoro

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.661.880.046	25,00%	415.470.012	Pipikoro
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.305.490.746	100,00%	1.305.490.746	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	1.305.490.746	100,00%	1.305.490.746	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	302.827.600	25,00%	75.706.900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	155.986.600	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	146.841.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	53.561.700	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	53.561.700	0,00%	0,00%	
					78,56%	25,00%	
					Tinggi	Sangat Rendah	
			1.661.880.046		78,56%	25,00%	
					Tinggi	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sigi Biromaru

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.779.391.119	25,00%	25,62%	Sigi Biromaru
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah (Persen Persen % Persen)	100	1.502.304.719	25,00%	28,63%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	1.457.544.719	100,00%	28,74%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	44.760.000	25,00%	25,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Persen %)	100	7.800.000	25,00%	25,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	7.800.000	25,00%	25,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (% Persen)	100	103.476.400	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.669.600	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5.746.800	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	89.060.000	0,00%	0,00%	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (% Persen)	100	165.810.000	25,00%	14,40%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	24.000.000	100,00%	14,48%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	137.810.000	16,67%	14,80%	
					85,29%	25,62%	
					Tinggi	Sangat Rendah	
				1.779.391.119	85,29%	25,62%	
					Tinggi	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Sigi Kota

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.555.861.819	25,00%	24,79%	Sigi Kota
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan daerah persentase serapan administrasi perangkat Daerah (% persen)	100	1.333.266.269	6,25%	25,65%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	1.278.291.519	25,00%	25,70%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	54.974.750	25,00%	24,56%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah pada perangkat daerah persentase barang milik daerah pada Perangkat daerah (% persen)	100	8.075.000	25,00%	14,86%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	8.075.000	16,67%	14,86%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah (1)	100	106.270.300	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	40.934.300	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	65.336.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1)	100	43.200.000	25,00%	63,43%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	1.000.000	0,00%	0,00%	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	4.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	38.200.000	25,00%	71,73%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	65.050.250	25,00%	23,06%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	5	65.050.250	20,00%	23,06%	
					22,96%	24,79%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				1.555.861.819	22,96%	24,79%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Tanambulava

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.940.147.538	25,00%	23,20%	Tanambulava
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PRESENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH (%)	25	1.637.389.808	25,00%	25,17%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	1.571.629.808	25,00%	25,08%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	65.760.000	33,33%	27,28%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentasi Baranga milik Daerah Pada Perangkat Daerah (%)	25	9.000.000	0,00%	0,00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	9.000.000	100,00%	0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor (Paket)	25	127.757.730	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9.149.780	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3.255.950	0,00%	0,00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	103.952.000	33,33%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	11.400.000	25,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PRESENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (%)	25	91.300.000	0,00%	25,30%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000	25,00%	0,00%	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	12.000.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	78.300.000	0,00%	29,50%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	25	74.700.000	0,00%	20,08%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	74.700.000	25,00%	20,08%	
					24,75%	23,20%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				1.940.147.538	24,75%	23,20%	
					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Marawola Barat

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			7		13=12/7x100%		16
1	3	4	K	Rp	K	Rp	
	Semua Bidang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		25	1.940.029.017	25,00%	23,48%	Marawola Barat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen administrasi BMD pada perangkat daerah persentase luaran pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah persentase pelaporan keuangan yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah (% % %)	100	1.702.340.817	25,00%	26,01%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	1.637.300.817	100,00%	26,55%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	65.040.000	100,00%	12,21%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Luaran Hasil Analisis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	1	121.482.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	30.742.000	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	90.740.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luaran hasil analisis dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	62.106.200	100,00%	20,77%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.406.200	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	56.700.000	100,00%	22,75%	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase luaran hasil analisis dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1	54.100.000	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	54.100.000	0,00%	0,00%	
					90,67%	23,48%	
					Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
				1.940.029.017	90,67%	23,48%	
					Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Sangat tinggi
(2)	Tinggi
(3)	Sedang
(4)	Rendah
(5)	Sangat Rendah



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam memuat kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah perlu melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang sudah dirancang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sigi Periode 2021-2026 dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan proyeksi ke depan diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sigi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional maupun regional, dimana harus saling sinergi untuk meningkatkan perekonomiannya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan upaya untuk mencapai visi misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Global, Nasional dan Regional

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2023 ditengah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun dan ketidakpastian pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap tinggi ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, stabilitas perekonomian yang terjaga, neraca pembayaran yang baik, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga dan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi baik dari *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), *Organisation for Economic Co-operation and Development*

(OECD) dan *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan pelemahan. IMF (rilis Oktober 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 Global/Dunia tumbuh sebesar 2,9 persen, negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,5 persen, Negara Eropa tumbuh sebesar 1,2 persen, Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen, Tiongkok tumbuh sebesar 4,2 persen, India tumbuh sebesar 6,3 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen.

Asian Development Bank (ADB) (rilis September 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 negara Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen, Vietnam tumbuh sebesar 6,0 persen, Thailand tumbuh sebesar 3,7 persen, Malaysia tumbuh sebesar 4,9 persen, India tumbuh sebesar 6,7 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen, selanjutnya IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 tumbuh sebesar 3,0 persen, pertumbuhan negara maju sebesar 1,7 persen, pertumbuhan negara berkembang sebesar 3,8 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05 persen, sedikit melambat dibanding Tahun 2022 sebesar 5,31 persen. Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada Tahun 2023, kecuali impor yang mengalami kontraksi sebesar 1,65 persen. Komponen Konsumsi LNPRRT tumbuh tinggi didorong aktivitas persiapan Pemilu baik dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu. Kemudian Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB (Investasi) masih merupakan penyumbang utama PDB pada Tahun 2023 dengan akumulasi kontribusi sebesar 82,51 persen. Sedangkan menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan (18,67 persen), perdagangan (12,94 persen), pertanian (12,53 persen), pertambangan (10,52 persen), dan konstruksi (9,92 persen) melanjutkan tren pertumbuhan positif.

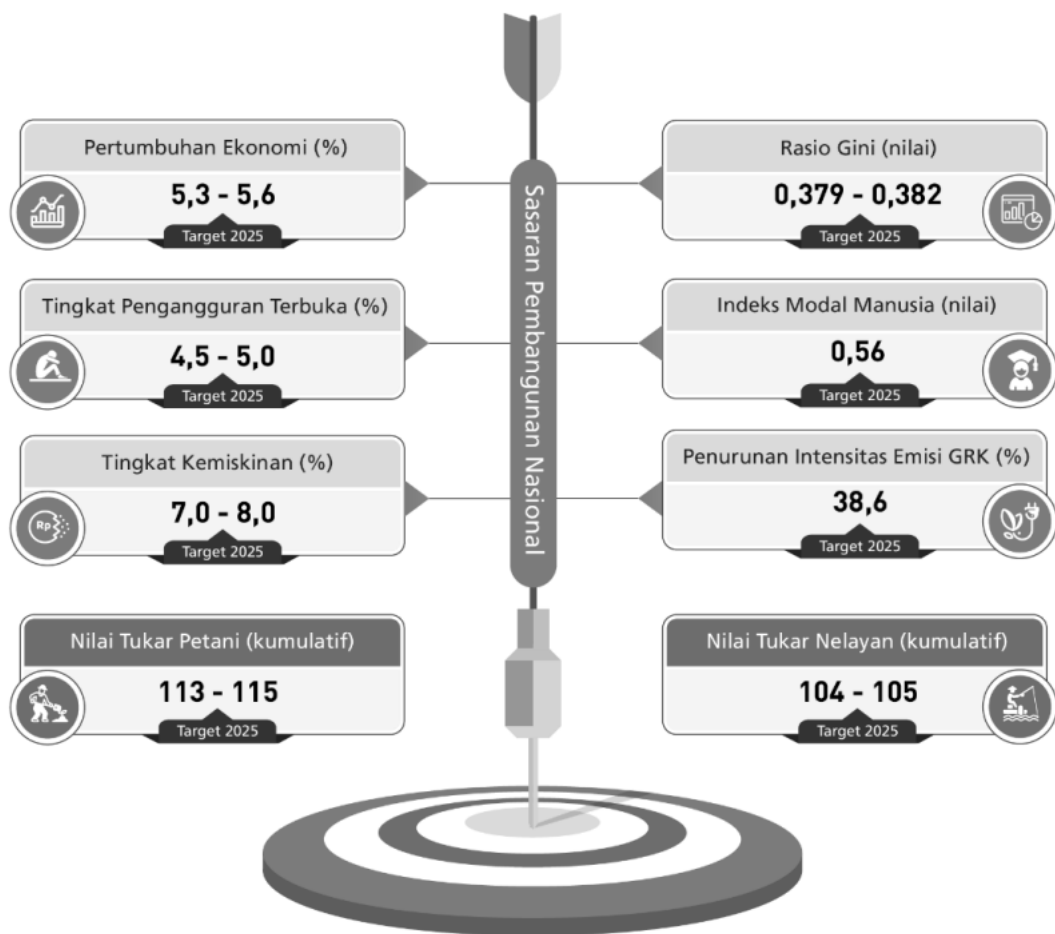
Perekonomian Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh baik dan berdaya tahan, ditengah perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi seperti (1) Pertumbuhan ekonomi global yang melemah; (2) Penurunan inflasi global yang melambat; (3) Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama; (4) Perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan penurunan nilai perdagangan barang, harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia (Kelapa Sawit, Batubara, Nikel, Gas Alam, Minyak Mentah)

nilainya mengalami penurunan; (5) *Prompt Manufacturing Index* (PMI) atau Indeks Manufaktur Global masih berada di zona ekspansif.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,32 persen pada tahun 2023 dari 5,86 persen pada tahun 2022. Sementara, angka kemiskinan nasional pada maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,381 pada September 2022, menjadi 0,388 pada maret 2023. Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Adapun Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Adapun target Indikator Makro Nasional pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Sasaran Pembangunan Nasional
Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Sigi

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sigi adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Kerangka ekonomi makro Kabupaten Sigi merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Selain indikator tersebut juga akan disertakan indikator – indikator lain sebagai penunjang dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.

Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Sigi terus bangkit pasca pandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini mulai terlihat pada tahun 2021 kondisi ekonomi telah pulih kembali dengan pertumbuhan sebesar 5,05%, dilanjutkan pada tahun 2022 sebesar 3,33%, tahun 2023 tumbuh 3,37% dan tahun 2024 tumbuh sebesar 3,50%. Kondisi perekonomian tersebut tentunya juga berpengaruh pada indikator lainnya seperti inflasi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan IPM.

Adapun target indikator makro ekonomi Pemerintah Kabupaten Sigi khususnya sebagai acuan sasaran pembangunan ekonomi daerah tercantum dibawah ini.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mencapai kondisi yang ideal. Selama kurun waktu tahun 2020 s.d 2024, perkembangan IPM kabupaten Sigi selalu meningkat. Pada masa covid-19, nilai IPM kabupaten Sigi sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Saat ini

nilai IPM Kabupaten Sigi sudah berada pada kelas/kategori IPM tinggi (diatas 70), dengan nilai IPM sebesar 70,90 pada tahun 2024 dan meningkat dibandingkan tahun 2023 pada angka 70,28.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Nilai IPM Kabupaten Sigi sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, seluruh komponen IPM, baik komponen kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita mengalami kenaikan.

2. Angka Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah. Di Kabupaten Sigi, pemerintah memiliki perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan selalu menyertakan upaya pengentasan kemiskinan di dalamnya. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi

kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Secara umum, pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di kabupaten sigi mencapai 12,83 persen dan pada tahun 2023 menurun 0,77 poin mencapai 12,06 persen. hal ini menunjukkan masih kurangnya akses pendidikan berkualitas, kesehatan, atau infrastruktur dasar. Atau terjadi peningkatan jumlah keluarga muda dengan anggota yang belum memasuki usia kerja, ini bisa meningkatkan jumlah penduduk miskin dalam jangka waktu pendek.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sigi. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sigi pada tahun 2024 mencapai 2,55% dimana Penduduk usia kerja pada Tahun 2024 sebanyak 201.052 jiwa, turun sebanyak 3.300 jiwa jika dibanding tahun 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 152.638 jiwa, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 48.414 jiwa. Komposisi angkatan kerja pada tahun 2024 terdiri dari 148.749 jiwa penduduk yang bekerja dan 3.889 jiwa pengangguran. Apabila dibandingkan tahun 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 12.350 jiwa. Penduduk bekerja naik sebanyak 12.112.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada tahun 2024, secara total pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi mengalami pertumbuhan sebesar 3,50 persen, dengan pertumbuhan yang terjadi pada setiap lapangan usaha. Terdapat 2 lapangan usaha yang tumbuh diatas 10% yaitu

Pertambangan dan Penggalian; dan Transportasi dan Pergudangan. Terdapat 9 lapangan usaha yang tumbuh dengan klasifikasi pertumbuhan ekonomi sedang (antara 5-10%), yaitu Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial.

Sedangkan 6 lapangan usaha lainnya berada pada pertumbuhan di bawah 5%. Lapangan Usaha tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan; dan Jasa Lainnya. Besaran Pertumbuhan ekonomi pada setiap lapangan usaha merupakan bentuk dari kemampuan adaptasi terhadap keadaan pandemi covid-19.

5. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator Tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sigi atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 45.975.516 rupiah atau rata-rata setiap bulannya masyarakat sigi akan memiliki penghasilan sekitar 3.831.293 rupiah. Namun sayangnya angka ini bukan berarti setiap masyarakat sigi memiliki penghasilan 3.831.293 rupiah setiap bulannya, karena terdapat ketimpangan antara penduduk rural dan urban. Sehingga, penghasilan tersebut bisa jadi dikuasai oleh beberapa persen kelompok masyarakat saja.

6. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2024, nilai Gini Ratio sebesar 0,246 menempatkan Kabupaten Sigi pada urutan ke-6 terendah di Sulawesi Tengah. Dibanding dengan Gini Ratio Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 yang sebesar 0,309. Namun jika dilihat dari ketimpangan pendapatan (gini ratio), di Kabupaten Sigi ada penurunan angka gini ratio dari 0,281 di tahun 2023 ke 0,246 di tahun 2024 ada penurunan sebesar 0,035 poin. Hal ini menunjukkan ada ketimpangan pendapatan antara kelompok

desil atas dan desil bawah akan tetapi ketimpangan pendapatan di kabupaten sigi masih di kategorikan ketimpangan rendah.

Perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menekan angka ketimpangan pendapatan, karena pada tahun dimana gini ratio naik sedikit saja, kemiskinan akan naik drastis.

Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan menjadi arahan untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah, Adapun kondisi ekonomi Kabupaten Sigi pada tahun 2023, 2024 dan proyeksi 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Sigi Tahun 2023, 2024 dan
Proyeksi Tahun 2025

URAIAN	2023	2024	Target 2025
Perkiraan Besaran-besaran Pokok			
PDRB atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	11.372.640	12.562.350	13.000.000-13.500.000
PDRB atas dasar harga Konstan (juta rupiah)	6.904.560	7.146.190	7.500.000-8.000.000
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (Rp)	42.127.129	45.975.516	40.500.000 –41.000.000
PDRB perkapita atas dasar harga konstan (Rp)	25.576.233	26.153.528	26.500.000-27.000.000
Pertumbuhan PDRB (%)	3,37	3,50	5,10-5,15
Laju inflasi, IHK Rata-rata*	0,80	0,80-1,00	0,80-1,00
Target Pembangunan			
Tingkat Kemiskinan (%)	12,83	12,06	11,00-11,50
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	31.470	29.800	28.000-28.500
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,40	2,52	2,40-2,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,64	0,70	0,60-0,70
Garis Kemiskinan (Rp)	445.106	463.011	475.000-500.000
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,60	2,55	2,50-2,60
Jumlah Penganggur	3.651	3.889	3.500-3.600
Gini Rasio	0,281	0,246	0,240-0,250
Indeks ketimpangan wilayah*	0,98	0,96-0,98	0,0,94-0,96
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,28	70,90	69,50-70,00
Angka harapan hidup	70,35	70,48	70,50-70,75
Rata-rata lama sekolah	9,03	9,04	9,05-9,06

URAIAN	2023	2024	Target 2025
Harapan lama sekolah	13,05	13,13	13,20-13,25
Pengeluaran perkapita (Ribu Rp.)	8.891	9.254	9.500-9.750
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public (Rumah Sakit)	86,00	87,00	87,00-88,00

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (*budgeting reform*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu manajemen penerimaan daerah, dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Reformasi anggaran dengan pendekatan *New Publik Management* meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari anggaran tradisional (*traditional budget*) ke anggaran berbasis kinerja (*performance budget*).

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah secara lebih spesifik diarahkan, sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
2. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
3. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
4. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, serta pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian fungsi anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh penting dalam pelaporan keuangan antara lain:

1. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah;
2. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
3. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan;
4. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;

Sebagaimana diketahui bahwa struktur APBD menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang meliputi:

- 1) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- 2) Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer;
- 3) Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Sigi, selain berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, khusus mengenai pengelolaan pendapatan daerah juga mengacu pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya menggali berbagai potensi sumberdaya penerimaan secara optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi pembangunan daerah.

Desentralisasi fiskal sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bermakna bahwa Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan desentralisasi/penyerahan urusan pemerintah melalui otonomi daerah, maka kebijakan umum pemerintah daerah berdasarkan undang-undang telah menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Sigi adalah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan
Kabupaten Sigi Tahun 2025

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		(Rp.)		
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)
1	2	3	4	5= 4-3
04	PENDAPATAN			
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	93.555.227.634	95.665.227.634	2.110.000.000
04.01.01	Pajak Daerah	46.459.795.588	46.459.795.588	0
04.01.02	Retribusi Daerah	3.315.132.046	3.425.132.046	110.000.000
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.000.000.000	1.000.000.000	0
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.780.300.000	44.780.300.000	2.000.000.000
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.099.561.673.164	1.144.997.567.859	45.435.894.695
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.053.334.736.429	1.079.177.594.995	25.842.858.566
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.226.936.735	65.819.972.864	19.593.036.129
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.236.558.238	19.444.070.783	1.207.512.545
04.03.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.236.558.238	19.444.070.783	1.207.512.545
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.211.353.459.036	1.260.106.866.276	48.753.407.240

Sumber : BKAD Kab.Sigi.

A. Pendapatan Daerah

Dengan melihat target pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp.1.211.353.459.036 dan untuk perubahan target pendapatan daerah naik sebesar Rp.1.260.106.866.276. Sebagai Berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya untuk usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi sebagai salah satu sumber pembebanan belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sigi, diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pajak dan retribusi daerah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam penerimaan PAD di Kabupaten Sigi antara lain adalah :

- 1) Mengoptimalkan pendataan objek-objek pajak dan retribusi baru.
- 2) Meningkatkan intensitas penagihan pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- 3) Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian kepada Petugas pemungut dalam penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4) Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Aparatur;
- 5) Pemberian penghargaan (reward) kepada petugas pemungut, pemerintah kecamatan dan desa yang target pajak dan retribusinya terpenuhi dan memberikan sanksi (Punishment) kepada petugas pemungut, pemerintah kecamatan dan desa yang tidak mencapai target;
- 6) Reformasi Pelayanan Publik dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Di sisi lain, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang :

- 1) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan;
- 2) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa, antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp.93.555.227.634 dan sesudah perubahan direncanakan sebesar Rp.95.665.227.634.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari 2 (dua) komponen yang terdiri dari : 1) Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi: Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum: Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Khusus: DAK Fisik dan DAK Non Fisik); Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa; 2) Dana Transfer Antar Daerah yang meliputi: Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar Rp.1.099.561.673.164 dan sesudah perubahan direncanakan sebesar Rp.1.144.997.567.859.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Pendapatan lain-lain. Secara umum Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari 1). Dana Darurat; 2). Dana Hibah; 3). Lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar Rp.18.236.558.238 dan sesudah perubahan direncanakan sebesar Rp.19.444.070.783.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow program* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

memberikan warna baru sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada kedua Undang-Undang tersebut, lebih-lebih dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada prinsipnya bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sigi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sigi dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Aturan

pokok tersebut dijabarkan ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi :

1. Asas Tahunan;
2. Asas universalitas;
3. Asas kesatuan;
4. Asas spesialisitas;
5. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
6. Profesionalitas;
7. Proporsionalitas;
8. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan; dan
9. Pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi :

1. Penyusunan dan penetapan APBD

Anggaran sebagai perencanaan dan perwujudan pengelolaan keuangan daerah merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. APBD sebagai instrumen kebijakan ekonomi, berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka pencapaian tujuan.

2. Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD merupakan tindak lanjut dari Rancangan APBD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Realisasi pelaksanaan APBD selama semester pertama harus dilaporkan dan dibuat prognosis untuk pelaksanaan semester selanjutnya. Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut :

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum daerah, keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan.

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu dengan bentuk dan isi yang sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas, diaudit oleh lembaga independen (dalam hal ini adalah BPK) sebelum disampaikan kepada DPRD dan pihak yang memerlukan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sigi masih dijumpai kendala-kendala sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah belum seluruhnya diterbitkan;
2. Tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan;
3. Kurang tersedianya sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan;
4. Belum optimalnya sinkronisasi jadwal penyusunan antara APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten;
5. Adanya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi, sementara pemerintah Kabupaten tidak diberitahu berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya;
6. Keuangan daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dengan persentase PAD sangat kecil terhadap APBD.

Dengan melihat kendala di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan modifikasi dan penyesuaian dengan peraturan yang baru;
2. Membentuk kerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
3. Mengikuti pelatihan dan *workshop* mengenai perkembangan peraturan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
4. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah Pusat agar prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis;
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi (OPD) untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa belanja daerah Kabupaten Sigi sebelum perubahan sebesar Rp.1.278.862.202.638,00, dan sesudah perubahan direncanakan sebesar Rp.1.299.635.030.066,00, dijabarkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan
Kabupaten Sigi Tahun 2025

NO	URAIAN	PERUBAHAN BELANJA DAERAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)
1	2	3	4	5
5	BELANJA			
05.01	BELANJA OPERASI	998.037.285.926	1.018.072.208.628	20.034.922.702
05.01.01	Belanja Pegawai	652.930.508.034	661.590.670.797	8.660.162.763
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	317.073.256.692	328.448.016.631	11.374.759.939
05.01.04	Belanja Subsidi	2.200.000.000	2.200.000.000	0
05.01.05	Belanja Hibah	25.694.521.200	25.694.521.200	0
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	139.000.000	139.000.000	0
05.02	BELANJA MODAL	53.768.587.148	53.808.156.720	39.569.572
05.02.01	Belanja Tanah	1.550.000.000	1.550.000.000	0
05.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	12.597.875.356	12.637.444.928	39.569.572
05.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	18.577.764.835	18.577.764.835	0
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.563.628.577	15.563.628.577	0
05.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.139.148.380	5.139.148.380	0
05.02.06	Belanja Aset Lainnya	340.170.000	340.170.000	0

NO	URAIAN	PERUBAHAN BELANJA DAERAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)
1	2	3	4	5
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	4.650.000.000	4.650.000.000	0
05.04	BELANJA TRANSFER	222.406.329.564	223.104.664.718	698.335.154
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	4.977.492.764	5.675.827.918	698.335.154
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	217.428.836.800	217.428.836.800	0
JUMLAH BELANJA		1.278.862.202.638,00	1.299.635.030.066,00	20.772.827.428,00

Sumber : BKAD Kab.Sigi.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi daerah), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan daerah lain yang diperlukan.

Adapun Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pembiayaan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan
Kabupaten Sigi Tahun 2025

KODE	URAIAN		JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)
1	2		3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	67.508.743.602	39.528.163.790	(27.980.579.812)
06.01.01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.508.743.602	39.528.163.790	(27.980.579.812)
6.2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-
06.02.02		Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO			67.508.743.602	39.528.163.790	(27.980.579.812)

Sumber : BKAD Kab.Sigi

A. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran berbasis kinerja memungkinkan penyusunan APBD defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja. Sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibanding dengan belanja. Untuk menutup defisit dan untuk menyalurkan surplus anggaran dibutuhkan pembiayaan. APBD Tahun Anggaran 2025-2029 yang menjadi tahun transisi antara RPJMD Tahun sebelumnya diproyeksikan masih akan mengalami defisit kurun waktu 5 (lima) Tahun akibat adanya upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan pencapaian Visi Misi Kabupaten Sigi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi masih menempatkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebagai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah.

B. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk belanja penyertaan modal dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan kepada masyarakat Kabupaten Sigi saat ini dan dimasa yang akan datang.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan strategi pembiayaan dimaksud, maka kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan untuk:

1. Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapai indikator sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dalam kaitan ini penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugas pemerintah yang bersifat stimulan, dan untuk swasta/masyarakat didorong melalui kerangka regulasi yang kondusif;
2. Mengarahkan pembiayaan program kegiatan yang tidak tumpang tindih melalui pemilahan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan melaksanakan pendanaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta perkiraan kapasitas masing-masing instansi/OPD dalam mengimplementasikan program-program pembangunan untuk mencapai indikator – indikator yang

telah ditetapkan, dengan demikian pelaksanaan pembangunan dapat selesai sesuai rencana dengan meminimalkan dana yang tidak terserap.

3. Mengutamakan pembiayaan program, kegiatan yang strategis dan cepat tumbuh, berkembang sehingga dengan cepat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Seperti yang tercantum dalam Bab I bahwa telah terjadi peralihan kepemimpinan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi periode Tahun 2025-2029. Pada masa periode ini telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 yaitu: Visi "Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata."

Adapun Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera
3. Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial
5. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan sejalan dengan tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sigi, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2025 terkait dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sigi yang merupakan transisi antara RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 seperti pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2025
yang terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Sigi Periode 2025 – 2029

VISI		
“Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata”		
MISI	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
(M.1) - Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar masyarakat	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
		2. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
		3. Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
		4. Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital

VISI		
"Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata"		
MISI	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
(M.2) - Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sejahtera	1. Meningkatkan kualitas masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing	1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		3. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga
		4. Meningkatnya berkebudayaan maju
		5. Meningkatnya literasi masyarakat
	2. Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	1. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
		2. Meningkatnya keluarga yang berkualitas
	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
		2. Menurunnya tingkat kemiskinan
(M.3) - Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata	1. Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah	1. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan
		2. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif
		3. Meningkatnya kesejahteraan petani

VISI		
"Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata"		
MISI	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
		4. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah	1. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif
		2. Meningkatnya nilai tambah perdagangan
		3. Meningkatnya daya saing industri
		4. Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian
		5. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
	3. Meningkatkan kemandirian masyarakat	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
		2. Meningkatnya pengembangan wilayah baru
(M.4) - Mewujudkan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial	1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		2. Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan
	2. Meningkatkan ketahanan bencana	1. Meningkatnya ketahanan bencana dan perubahan iklim
	3. Meningkatkan harmoni sosial	1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

VISI		
“Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata”		
MISI	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
		2. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM
		3. Meningkatnya harmoni sosial secara inklusif
(M.5) - Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif	1. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
		2. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien
		3. Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika
		4. Meningkatnya keamanan informasi
		5. Meningkatnya tata kelola arsip
		6. Meningkatnya profesionalitas ASN
		7. Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan ketrampilan ASN
		8. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

VISI		
"Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata"		
MISI	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
	2. Meningkatkan pengelolaan pembangunan yang akuntabel	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
		2. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
		3. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
		4. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
		5. Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah
		6. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan, senantiasa diperhadapkan dengan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut bila tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perumusan terhadap permasalahan daerah tersebut adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa mendatang. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut berasal dari faktor-faktor internal dan eksternal pemerintahan daerah.

4.2.1 Tema Prioritas Pembangunan Kabupaten Sigi, Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2025

Guna menselaraskan tema pembangunan Kabupaten Sigi dan mendukung tema RKP Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebagai berikut:

Tema RKP Nasional Tahun 2025	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	Tema RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2025
		
"AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"	"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN YANG DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING"	"AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF BERBASIS AGRIBISNIS YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN"

Sasaran dan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2025 selanjutnya diselaraskan dengan ASTA CITA / Prioritas Nasional untuk mendukung pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Prioritas Nasional

❖ Prioritas Nasional 1 :	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
❖ Prioritas Nasional 2 :	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
❖ Prioritas Nasional 3 :	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
❖ Prioritas Nasional 4 :	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
❖ Prioritas Nasional 5 :	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
❖ Prioritas Nasional 6 :	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
❖ Prioritas Nasional 7 :	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
❖ Prioritas Nasional 8 :	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;

Mengacu kepada prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional yang akan dicapai pada tahun 2025, yang merupakan perwujudan prioritas nasional, dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta prioritas

pembangunan daerah Kabupaten Sigi, maka program prioritas Kabupaten Sigi tahun 2025 yang mendukung terhadap program prioritas pada Prioritas Nasional dalam RKP 2025 dapat dikelompokkan kedalam 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 : (Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM))

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.

Berpedoman pada arah kebijakan Prioritas Nasional 1 dalam RKP 2025, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 1 Tahun 2025 seperti dalam tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia"
Tahun 2025

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
		4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2	Penguatan Demokrasi	1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

2. Prioritas Nasional 2 : (Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru)

Prioritas Nasional Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dengan arah kebijakannya.

Berpedoman pada arah kebijakan pada Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dalam RKP 2025, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 2 Tahun 2025 seperti dalam tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.4
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Tahun 2025

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Penguatan Keamanan Negara	1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
2	Distribusi Pusat-Pusat Pertumbuhan (PKW) Ke Wilayah Belum Berkembang	1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		2	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
		3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
3	Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
4	Swasembada Pangan	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
		2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
		8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		11	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
			KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
5	Swasembada Air	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
6	Ekonomi Digital	1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
7	Ekonomi Hijau	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
		2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		3	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

3. Prioritas Nasional 3: (Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi)

Prioritas Nasional (Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim

Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi), dengan arah kebijakan yaitu :

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
2. Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya;
3. Penguatan koperasi;
4. Mengembangkan industri kreatif;
5. Pendalaman sektor keuangan.

Berpedoman pada arah kebijakan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi dalam RKP 2025, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 3 Tahun 2025 seperti dalam tabel 4.5. berikut:

Tabel 4.5
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Tahun 2025

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
		7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		8	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2	Mendorong Kewirausahaan Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Seluas-Luasnya	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
3	Penguatan Koperasi	1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
		2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
		3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
		4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
4	Mengembangkan Industri Kreatif	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
		4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		5	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

4. Prioritas Nasional 4 : (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas)

Prioritas Nasional Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan arah kebijakan yaitu :

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia;
2. sains;
3. teknologi;
4. pendidikan;
5. kesehatan;
6. prestasi olahraga;
7. kesetaraan gender;
8. serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Berpedoman pada arah kebijakan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam RKP 2025, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 4 Tahun 2025 seperti dalam tabel 4.6. berikut:

Tabel 4.6
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Tahun 2025

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2		1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
	Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		4	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
		5	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
		7	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
3	Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
4	Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
		7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
		8	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

NO	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
5	Meningkatkan Prestasi Olahraga	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

5. Prioritas Nasional 5 : (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri)

Prioritas Nasional Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Pengembangan Hilirisasi Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru;
2. Penguatan Industri Padat Karya Berkelanjutan, Industri Dasar, Dan Industri Strategis Nasional;
3. Pengembangan Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global.

Berpedoman pada arah kebijakan Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dalam RKP 2025, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 5 Tahun 2025 seperti dalam tabel 4.7. berikut :

Tabel 4.7
Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dalam RKP Tahun 2025

	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Pengembangan Hilirisasi Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten	
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		5	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		6	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		7	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		8	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

6. Prioritas Nasional 6 : (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan)

Prioritas Nasional Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Membangun Desa dan Membangun Dari Desa;
2. Pemerataan Ekonomi
3. Memberantas Kemiskinan

Berpedoman pada arah kebijakan Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dalam RKP 2025, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 6 Tahun 2025 seperti dalam tabel 4.8. berikut :

Tabel 4.8
Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dalam RKP Tahun 2025

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Membangun Desa dan Membangun Dari Desa	1	PROGRAM PENATAAN DESA
		2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
		3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2	Pemerataan Ekonomi	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

7. Prioritas Nasional 7 : (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan)

Prioritas Nasional Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan arah kebijakan yaitu:

1. reformasi politik;
2. reformasi hukum;
3. reformasi tata kelola pemerintahan
4. pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan;
5. penguatan tatakelola Badan Usaha Milik Negara.

Berpedoman pada arah kebijakan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dalam RKP 2025, serta menganalisis

permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 7 Tahun 2025 seperti dalam tabel 4.9. berikut :

Tabel 4.9
Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan dalam RKP Tahun 2025

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Reformasi Politik	1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
3	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
		3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		4	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
		5	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		6	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		9	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
		11	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

8. Prioritas Nasional 8 : (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur)

Prioritas Nasional Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis;
2. Melestarikan budaya;
3. Penanganan bencana.

Berpedoman pada arah kebijakan Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dalam RKP 2025, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi, maka dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi pada Prioritas Nasional 8 Tahun 2025 seperti dalam tabel 4.9. berikut :

Tabel 4.10
Dukungan Program Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dalam RKP Tahun 2025

No	Program Prioritas Nasional		Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Melestarikan budaya;	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
		4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2	Penanganan Bencana	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Tabel. 4.11
Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional,
Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan
Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Sigi Tahun 2025

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;	(M.4) - Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	(M.4) - Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial	3. Meningkatkan harmoni sosial	2. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,	(M.4) - Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	(M.4) - Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial	3. Meningkatkan harmoni sosial	1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
	Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;				
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;	(M.3) - Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antarsektor	(M.1) - Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar masyarakat	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
					2. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
					3. Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
					4. Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;	(M.1) - Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja	(M.2) - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera	1. Meningkatkan kualitas masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkeadilan dan berdaya saing	1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
					2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
					3. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga
					4. Meningkatnya berkebudayaan maju
					5. Meningkatnya literasi masyarakat
				2. Meningkatkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	1. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
					2. Meningkatnya keluarga yang berkualitas

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
				3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
					2. Menurunnya tingkat kemiskinan
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;	(M.2) - Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	(M.3) - Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata	1. Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah (basis alam)*	1. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan 2. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Meningkatnya kesejahteraan petani 4. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
				2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah	1. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif
					2. Meningkatnya nilai tambah perdagangan
					3. Meningkatnya daya saing industri
					4. Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian
					5. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;	(M.2) - Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	(M.3) - Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata	3. Meningkatkan kemandirian masyarakat	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
					2. Meningkatnya pengembangan wilayah baru
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;	(M.4) - Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	(M.5) - Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif	1. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan partisipasi aktif masyarakat	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
					2. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien
					3. Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
					4. Meningkatnya keamanan informasi
					5. Meningkatnya tata kelola arsip
					6. Meningkatnya profesionalitas ASN
					7. Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan ketrampilan ASN
					8. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
				2. Meningkatkan pengelolaan pembangunan yang akuntabel	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
					2. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
					3. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
					4. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
					5. Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah
					6. Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan

No	Prioritas Nasional (ASTA CITA)	Prioritas Pembangunan Provinsi	Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi yang Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi		
			Prioritas Pembangunan Kabupaten	Tujuan Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Kabupaten
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;	(M.3) - Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antarsektor	(M.4) - Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial	1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
					2. Meningkatnya penataan ruang yang berkelanjutan
				2. Meningkatkan ketahanan bencana	1. Meningkatnya ketahanan bencana dan perubahan iklim
				3. Meningkatkan harmonis sosial	3. Meningkatnya harmoni sosial secara inklusif

4.2.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Sinkronisasi Prioritas pembangunan daerah yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Sigi Periode 2021-2026 agar keselarasan dan konsistensi antara prioritas Pembangunan daerah (RPJMD) dan prioritas pembangunan daerah (RKPD), maka disusun prioritas pembangunan daerah tahun 2025 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12

Sinkronisasi Antara Misi, Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD

No.	Misi	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Infrastruktur Secara Merata dan berkeadilan
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sejahtera	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sejahtera	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sejahtera
3	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata
4	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup , ketahanan bencana dan harmoni sosial
5	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Transparan dan Partisipatif	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Transparan dan Partisipatif	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Transparan dan Partisipatif

Selanjutnya pengalokasian pagu anggaran secara konsisten mengacu kepada prioritas pembangunan daerah tersebut di atas, sebagaimana pada tabel berikut ini:

4.2.3 Program Unggulan Kabupaten Sigi

Program Unggulan adalah program yang diprioritaskan untuk dapat memberikan dampak signifikan bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sigi, yang merupakan Janji Politik Kepala Daerah antara lain:

1. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, serta pembukaan akses jalan di daerah terisolir guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menggerakkan ekonomi lokal serta pembangunan infrastruktur perkantoran.

2. Akses Air Bersih, Perumahan Layak dan Layanan Publik untuk Masyarakat Masyarakat kurang mampu.

Meningkatkan akses air bersih, sanitasi, perumahan layak, serta menyediakan layanan meteran air dan meteran listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

3. Seragam Gratis Bagi Siswa Baru dari Masyarakat Kurang Mampu, Peningkatan Sarana Pendidikan dan Kesehatan yang Terintegrasi.

Penyediaan Seragam Gratis Bagi Siswa Baru dari Masyarakat Kurang Mampu, membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang unggul di setiap kecamatan, melanjutkan program "1 (satu) kecamatan 1 (satu) dokter" dan menciptakan sekolah unggulan di setiap kecamatan guna meningkatkan kualitas SDM.

4. Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM yang Berdaya Saing, Bantuan Permodalan dengan Hibah 1 (satu) Juta - 10 (sepuluh) Juta Rupiah dan KUR 0%.

Mengoptimalkan sektor pertanian melalui fasilitasi ketersediaan bibit, pupuk, alat mesin pertanian (ALSINTAN) dan subsidi bahan bakar bagi petani. Penyediaan Ternak dan Perikanan serta meningkatkan akses keuangan dan permodalan untuk UMKM guna mendorong produktivitas dan daya saing lokal, membentuk PERUSDA dan Koperasi berbasis pertanian, memfungsikan kembali Terminal serta pembangunan Pasar Induk Modern Tambuli dan Pembangunan Rumah Potong Hewan dan Pasar Ikan Air Tawar.

5. Penerapan Infrastruktur Hijau dan Mitigasi Bencana.

Menerapkan praktik pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, sambil memperkuat mitigasi bencana di daerah rawan bencana.

6. Pengembangan SDM melalui Pelatihan, Pendidikan Formal serta Non Formal dan Layanan Beasiswa, Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Personil Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Beasiswa Siswa Berprestasi.

Meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat, memperkuat sekolah-sekolah swasta, serta memberikan layanan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu dan beasiswa siswa berprestasi.

7. Penguatan Ekonomi dan Perlindungan Sosial bagi Petani, Lembaga Adat, Majelis Adat, Dewan Adat dan Masyarakat Kurang Mampu.

Mengembangkan program asuransi pertanian, peternakan dan ketenagakerjaan bagi petani dan peternak kurang mampu. Penyediaan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi lembaga adat, majelis adat dan dewan adat, serta melanjutkan perlindungan sosial untuk tenaga honor daerah dengan program seperti "Masagena Plus" untuk mendukung kesehatan dan pemberdayaan masyarakat rentan.

8. Pengembangan Pariwisata, Kebun Raya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Meningkatkan layanan pariwisata di Danau Lindu, Paralayang dan Air Panas Bora serta mendorong Desa Wisata dan melanjutkan pengembangan Kebun Raya Sidondo, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Binangga, Kalukubula, Lolu, dan Kabobona, serta kawasan lainnya guna mendukung pariwisata lokal sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.

9. Penerapan Teknologi dalam Bisnis dan Pemerintahan

Mendorong digitalisasi dalam UMKM dan sektor bisnis untuk meningkatkan efisiensi serta menerapkan sistem e-government guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan.

10. Peningkatan Harmoni Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Memperkuat harmoni sosial melalui program "Sigi Religi" melanjutkan Umroh Gratis bagi Imam Masjid dan Pegawai Syara serta Wisata Religi bagi Opsir/Pendeta, kegiatan Festival Maulid, Festival Rohani bagi umat Nasrani dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan.

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sigi merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD Kabupaten Sigi berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sigi memuat pandangan dan pertimbangan mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sigi sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam Menyusun rencana kerja dan pembangunan daerah implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Sigi Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pokok – pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) untuk disesuaikan dengan bidang urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sigi untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sigi dan dimasukkan kedalam e-planning (SIPD).

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RKPD Tahun 2025. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Penentuan program dan kegiatan daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sigi pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sigi.

5.1. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Adapun pagu pendanaan perubahan RKPD 2025 diberikan kepada perangkat daerah dalam rangka mendukung skala prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Sigi 2025-2029, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.5.1
Rekapitulasi Alokasi Anggaran Perubahan RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Alokasi Pagu Perubahan RKPD		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345.891.265.880,00	347.962.215.048,00	2.070.949.168,00
2	Dinas Kesehatan	125.813.783.354,00	129.424.212.767,00	3.610.429.413,00
3	RSUD TORABELO KABUPATEN SIGI	54.484.979.615,00	56.498.402.497,00	2.013.422.882,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	34.029.490.470,00	34.044.999.730,00	15.509.260,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.387.915.845,00	8.396.835.133,00	8.919.288,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.333.534.012,00	5.348.302.382,00	14.768.370,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.940.802.194,00	3.954.198.848,00	13.396.654,00
8	Dinas Sosial	6.333.555.028,00	6.346.240.064,00	12.685.036,00
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4.085.070.584,00	4.097.333.162,00	12.262.578,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.971.552.076,00	2.983.069.540,00	11.517.464,00
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	6.505.201.158,00	6.530.869.656,00	25.668.498,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	14.063.267.808,00	14.079.652.872,00	16.385.064,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.049.313.642,00	5.063.984.540,00	14.670.898,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.723.674.721,00	5.734.322.461,00	10.647.740,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.001.093.987,00	9.013.511.589,00	12.417.602,00

No.	Perangkat Daerah	Alokasi Pagu Perubahan RKPD		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
16	Dinas Perhubungan	5.283.860.888,00	5.312.335.364,00	28.474.476,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.331.627.551,00	4.341.790.413,00	10.162.862,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7.218.951.684,00	7.228.371.288,00	9.419.604,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.788.822.219,00	4.807.356.875,00	18.534.656,00
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.728.597.341,00	5.740.085.259,00	11.487.918,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.771.302.885,00	2.783.006.291,00	11.703.406,00
22	Dinas Pariwisata	3.601.846.316,00	3.614.019.358,00	12.173.042,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.235.607.974,00	13.270.067.540,00	34.459.566,00
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	27.136.294.594,00	27.219.661.838,00	83.367.244,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.616.229.074,00	5.718.191.066,00	101.961.992,00
26	Sekretariat Daerah Kab. Sigi	51.374.345.679,00	52.522.901.253,00	1.148.555.574,00
27	Sekretariat DPRD Kab. Sigi	22.806.729.989,00	25.796.563.331,00	2.989.833.342,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	6.069.901.194,00	6.083.177.952,00	13.276.758,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	417.499.295.584,00	423.750.245.667,00	6.250.950.083,00
30	Badan Pendapatan Daerah	15.688.578.968,00	15.712.898.322,00	24.319.354,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	7.156.065.028,00	7.172.840.740,00	16.775.712,00
32	Inspektorat Kab. Sigi	11.802.361.594,00	13.829.707.904,00	2.027.346.310,00

No.	Perangkat Daerah	Alokasi Pagu Perubahan RKPD		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
33	Kecamatan Dolo	2.235.297.865,00	2.243.866.747,00	8.568.882,00
34	Kecamatan Dolo Barat	2.214.891.756,00	2.223.735.688,00	8.843.932,00
35	Kecamatan Dolo Selatan	1.599.377.682,00	1.605.521.928,00	6.144.246,00
36	Kecamatan Kulawi Selatan	1.804.416.839,00	1.808.623.889,00	4.207.050,00
37	Kecamatan Kulawi	1.860.074.031,00	1.866.474.695,00	6.400.664,00
38	Kecamatan Lindu	1.256.550.721,00	1.261.449.913,00	4.899.192,00
39	Kecamatan Marawola	2.008.053.534,00	2.016.771.056,00	8.717.522,00
40	Kecamatan Marawola Barat	1.940.029.017,00	1.945.888.377,00	5.859.360,00
41	Kecamatan Kinovaro	2.248.793.206,00	2.256.505.906,00	7.712.700,00
42	Kecamatan Palolo	2.226.456.881,00	2.233.171.491,00	6.714.610,00
43	Kecamatan Nokilalaki	1.679.807.032,00	1.684.957.278,00	5.150.246,00
44	Kecamatan Tanambulava	1.940.147.538,00	1.946.332.970,00	6.185.432,00
45	Kecamatan Gumbasa	1.513.341.294,00	1.519.651.466,00	6.310.172,00
46	Kecamatan Pipikoro	1.661.880.046,00	1.667.844.354,00	5.964.308,00
47	Kecamatan Sigi Biromaru	1.779.391.119,00	1.785.595.039,00	6.203.920,00
48	Kecamatan Sigi Kota	1.555.861.819,00	1.561.073.491,00	5.211.672,00
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.612.913.322,00	5.626.195.028,00	13.281.706,00

No.	Perangkat Daerah	Alokasi Pagu Perubahan RKPD		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
JUMLAH		1.278.862.202.638,00	1.299.635.030.066,00	20.772.827.428,00

Dari hasil rumusan prioritas pembangunan daerah selanjutnya secara konsisten dijabarkan kedalam program prioritas daerah, yang secara rinci tertuang dalam tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang termuat dalam tabel 5.2. *print by* SIPD sebagai berikut :

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk mewujudkan pencapaian target-target prioritas pembangunan Kabupaten Sigi, telah dirumuskan program prioritas pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta target pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Sigi. Hal ini berdasarkan pada aspek dan fokus pada bidang urusan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sigi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

Adapun Penetapan Indikator Kinerja Utama selanjutnya disajikan dalam tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)
Pemerintahan Kabupaten Sigi
Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
	Peningkatan Pendapatan Perkapita		
1	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	<i>Rp. Juta</i>	48,00
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	1.98-2.00
3	Indek ekonomi hijau	Angka	70,00
4	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%);	%	41,38
5	Kontribusi PDRB Pariwisata (%)	%	0,51

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang		
6	Tingkat Kemiskinan (%)	%	11,8-11,5
7	Rasio Gini (indeks)	Angka	0,25
8	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	3,80-4,00
9	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	%	0,59
10	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	0,4
11	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak terjangkau dan berkelanjutan	%	85,43
12	Presentase Desa mandiri (%)	%	10,42
	Kepemimpinan dan Pengaruh di provinsi Meningkat		
13	Indek reformasi birokrasi	Angka	50,00
14	Indek inovasi daerah	Angka	50,75
15	Indek daya saing daerah	Angka	3,67
16	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	Angka	75,00
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP
	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
19	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,00
20	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,12
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,26
22	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,69
23	Prevalensi Stunting	%	24,95
24	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	60,00
25	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,84
	Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission		
26	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	%	28,00
27	Indek kualitas lingkungan hidup daerah	Angka	70,00
28	Indeks Ketahanan Bencana	Angka	0,47

Adapun Penetapan Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disajikan dalam tabel 6.2 di bawah ini:

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Terhadap Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sigi Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	80,86
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	11,97
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	30,12
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	80,30
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	70,00
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	74,01
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	39,36
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	12,73
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	28,00
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	48,22
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,47
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,90
13	Rasio Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin)	%	105,11
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km	52,52
15	Indeks ekonomi hijau	Angka	70,00
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.80-4.00
2	Tingkat Kemiskinan	%	11.8-11.5
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	48,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,04
5	Gini Ratio	Angka	0,25
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,00
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,69
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,21
9	Prevalensi Stunting	%	24,95
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,12
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,26
12	Angka Literasi/Numerasi :		
	- Skor Kemampuan Literasi	Skor	55,22
	- Skor Kemampuan Numerasi	Skor	50,66

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	50,00
14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	75,00
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	50,20
16	Indeks Perlindungan Anak	Angka	
17	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	60,00
18	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,44
19	Indeks Pembangunan Gender	Angka	94,84
III ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Angka Ketergantungan	%	51,55
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB)	%	2,21
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (ADHB)	%	0,55
4	Rasio Kewirausahaan	%	2,00
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,68
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50,75
7	Indeks Ekonomi Hiiu	Angka	70,00
8	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	0,40
9	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	85,43
10	Persentase Desa Mandiri	%	10,42
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,60
12	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	1,98
13	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%);	%	41,38
14	Kontribusi PDRB Pariwisata (%)	%	0,51
IV ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	87,83
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	92,92
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	80,30
4	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,67
5	Indek reformasi birokrasi	Angka	50,00
6	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,32
7	Persentase MCP KPK	%	43,43

Tabel 6.3
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Terhadap Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sigi Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
A	Pendidikan		
1	Skor Literasi	Angka	55,22475
	Skor Numerasi	Angka	50,66205
2	Harapan Lama Sekolah	Angka	14
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	16
B	Kesehatan		
1	Umur Harapan Hidup	Angka	72,47
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Indeks Infrastruktur	Angka	0,40
D	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase	85,4258
F	Sosial		
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	71,00
G	Tenaga Kerja		
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	3.184.577
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,84185
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,44
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	54,0
I	Pangan		
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	80,8606
J	Lingkungan Hidup		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	Angka	70
M	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	60
Q	Penanaman Modal		
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persentase	38%
R	Kepemudaan dan Olahraga		
2	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Angka	0,500

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4
S	Statistik		
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Persentase	2,6
U	Kebudayaan		
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	50,19975
V	Perpustakaan		
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	68,00
W	Kearsipan		
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintah Daerah	Predikat	B
X	Kelautan dan Perikanan		
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105,00
2	Nilai Tukar Pembudidayaan Perikanan (NTPi)	Angka	104,00
Y	Pariwisata		
1	Kontribusi PDRB Pariwisata (%)	Persentase	0,5145
Z	Pertanian		
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	109,00
CC	Perdagangan		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	14,00
DD	Perindustrian		
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	1,97
FF	Sekretariat Daerah		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB
GG	Sekretariat DPRD		
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	98
II	Keuangan		
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP
KK	Pendidikan dan Pelatihan		
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Angka	98
MM	Pengawasan		
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,3229

6.1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program pembangunan daerah Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sigi, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten Sigi yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, dan potensi unggulan daerah.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sigi berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial adapun target capaian disajikan dalam tabel 6.3 di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 6.3.
Target Indikator Kinerja Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Sigi Tahun 2025

1. Urusan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2025
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTS)	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2025
		Rata rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
		Rata rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD)	100%

2. Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2025
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2025
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus), Yang Bersifat Peningkatan/Promotif Dan Pencegahan/ Preventif	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

3. Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2025
I	URUSAN PEKERJAAN UMUM		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	221.148 jiwa
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	191.850 jiwa

4. Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2025
I	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	156 unit
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2025
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	10 Orang
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	15000 Orang
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1000 Orang
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2000 Orang
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	75 Orang

6. Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2025
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	36 orang
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	60 orang
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	380 orang
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	9 orang
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten /kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	1570 orang

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sigi Tahun 2025 memuat evaluasi capaian pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan serta rencana kerja dan pendanaan Kabupaten Sigi Tahun 2025 baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Penyusunan Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sigi Tahun 2025 memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi dan Prioritas Nasional. Daftar program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan yang diakibatkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi, menurunnya pendapatan daerah, potensi meningkatnya jumlah Kepala Keluarga miskin, potensi meningkatnya jumlah pengangguran, dan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu diperlukan kerja cerdas dan upaya bersama semua pemangku kepentingan dalam melewati tantangan di atas.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sigi Tahun 2025 menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2025.

BUPATI SIGI,



MOHAMAD RIZAL INTJENAE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025